

**PENGARUH PENGELOLAAN ASET DAERAH SISTEM  
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH  
PADA KANTOR BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh:**

**N A M A : NASTASYA DIAN PRAHASKI  
N P M : 1405170485  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari rabu, tanggal 03 oktober 2018, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : NASTASYA DIAN PRUHASKI  
N P M : 1405160485  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : PENGARUH PENGELOMPOKAN ASET DAERAH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH PADA KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Ditandatangani : (B) Lulus Ujian dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

TIM PENJURI

Penguji I :   
DRS. H. HOTIMALJA SARAK, MM

Penguji II :   
FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Pembimbing :   
DR. ARFAN IKHSAN, SE, M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
H. JANURI, SE, MM, M.Si

  
ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : NASTASYA DIAN PRAHASKI

N.P.M : 1405170485

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN

Judul Skripsi : PENGARUH PENGELOLAAN ASET DAERAH DAN  
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH  
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA  
KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi.

Medan, September 2018

Pembimbing Skripsi

(Dr. ARFAN IKHSAN, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)



Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama Lengkap** : NASTASYA DIAN PRAHASKI  
**N.P.M** : 1405170485  
**Program Studi** : AKUNTANSI  
**Konsentrasi** : AKUNTANSI KEUANGAN  
**Judul Skripsi** : PENGARUH PENGELOLAAN ASET DAERAH DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
06 Agustus 2018	a. Hasil penelitian diuraikan dengan jelas	[Signature]	
12 Agustus 2018	Hasil Angket yg disebar di lengkapi	[Signature]	
30 Agustus 2018	Hasil Data Statistik	[Signature]	
1 September 2018	Tambahkari dukungan dari penelitian terdahulu	[Signature]	
3 September 2018	Perbaiki data pendukung statistik	[Signature]	
15 September 2018	Acc (selesai bimbingan skripsi)	[Signature]	

Pembimbing Skripsi

Dr. ARFAN IKHSAN, SE, M.Si

Medan, September 2018  
Diketahui /Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS  
Jenjang : Strata Satu (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si  
Dosen Pembimbing : Dr. ARFAN IKHSA, SE, M.Si

Nama Mahasiswa : NASTASYA DIAN PRAHASTI  
NPM : 1405170485  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN  
Judul Proposal : PENGARUH PENGELOLAAN ASET DAERAH DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
5 Maret 2018	Bab 1. fenomena dan latar belakang		
19 Maret 2018	Bab 1. Konsep belum Terhubung		
26 maret 2018	Bab 2. Teor. Kurang dan luar lengkap		
2 April 2018	Kerangka berfikir/konseptual Bab 2		
16 April 2018	Bab 3 Populasi dan Sampel.		
4 Mei 2018	Acc Proposal.		

Dosen Pembimbing

Dr. ARFAN IKHSA, SE, M.Si

Medan, Mei 2018  
Diketahui /Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si



## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nastasya Dian Prahaski  
NPM : 1405170485  
Program : Strata-1  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil **PLAGIAT** atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, November 2018

Saya yang menyatakan,



Nastasya Dian Prahaski

## ABSTRAKSI

### **PENGARUH PENGELOLAAN ASET DAERAH DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, SKRIPSI, 2016**

Pengelolaan keuangan negara dan daerah yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap baiknya penyelenggaraan negara dan daerah sebagaimana itu merupakan bagian dari tata kelola yang baik. Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengelola keuangannya sendiri. Wajar saja ketika masyarakat berhak untuk menuntut transparansi dan pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan daerah. Penyusunan laporan keuangan pemerintah merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Perwujudan adanya laporan keuangan pemerintah yang berkualitas baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dibangunlah suatu sistem akuntansi yang baik

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian dalam permasalahan deskriptif merupakan penelitian yang berupaya untuk mengkaji dan menjelaskan bagaimana suatu variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada Kantor BPKAD Provinsi Sumatera Utara bidang akuntansi dan keuangan berjumlah 35 orang (berdasarkan hasil wawancara dan surat penelitian). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melalui penyebaran angket di lokasi penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian signifikansi parsial (uji-t) diperoleh hasil dengan perbandingan t-hitung dan t-tabel ( $3.141 > 1.69$ ) sehingga variabel pengelolaan Aset Daerah memiliki pengaruh yang negative dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, kemudian pada variabel Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah diperoleh hasil yaitu hasil t-hitung  $>$  t-tabel ( $4.136 > 1.69$ ) bahwa variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan hasil pengujian signifikansi simultan diperoleh hasil F-hitung  $>$  F-tabel ( $12.581 > 3.29$ ) bahwa variabel bebas Pengelolaan Aset (X1) dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) secara serempak dan signifikan berpengaruh terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y).

Kata Kunci : Pengelolaan Aset, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kualitas Laporan Keuangan Daerah

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh**

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat, karunia dan hidayahNya Dan tidak lupa shalawat beriringkan salam dihadiahkan kepada suri tauladan Nabi besar Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan judul **PENGARUH PENGELOLAAN ASET DAERAH DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**. Penulis membuat proposal skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa penulisan proposal skripsi ini tidak mungkin akan terwujud apabila tidak ada bantuan dari berbagai pihak, untuk ini melalui kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Agussani M.AP., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Januri S.E., M.M., M.Si., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Ibu Fitriani Saragih SE, M.Si., Dan Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si., Selaku Ketua Dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



4. Bapak Dr. Arfan Ikhsan., S.E., M.Si., yang telah meluangkan waktu, dan pikiran di dalam memberikan bimbingan kepada penulis khususnya dalam skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala ilmu dan pengarahan yang telah diberikan kepada penulis.
6. Kepada Orang Tua saya yang telah banyak memberikan kasih sayang, motivasi serta dukungan dan do'a kepada penulis.
7. Bapak H.AGUS TRIPRIYONO,SE,M,SI.AK,CA, selaku kepala Badan Pengelolaan Keuangan Asset Daerah Provinsi Sumatera Utara yang telah membantu dalam memberikan informasi serta memberikan izin untuk melakukan penelitian di kantor tersebut.
8. Bapak H.RAJA INDRA SALEH,SH yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama dalam pelaksanaan penelitian berlangsung.
9. Karyawan dan karyawan Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara yang memberikan bimbingan dan pengarahan selama kegiatan penelitian berlangsung.
10. Kepada Teman-Teman seperjuangan kuliah yang saling memberi support dalam menyelesaikan tugas-tugas akhir dalam kuliah.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dari semua pihak yang telah mendampingi penulis dan membantu penulis hingga saat ini. Akhirnya, penulis berharap proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu.

Dengan demikian bahwa penulisan proposal skripsi saya ini belum sempurna. Semoga proposal skripsi saya ini memberikan manfaat bagi pembaca secara umum dan secara khusus bagi penulis pribadi. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

**Billahi fiisabililhaq fastabiqul khairat**

**Wassalamua'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh**

Medan, Maret 2018

Penulis

Nastasya Dian Prahaski

## DAFTAR ISI

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	9
C. Rumusan masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	10

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pengelolaan Aset Daerah .....	12
B. Sistem Akutansi Keuangan Daerah.....	18
C. Laporan Keuangan Daerah.....	25
D. Penelitian Terdahulu .....	33
E. Kerangka Konseptual .....	36
F. Hipotesis.....	40

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	41
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	41
C. Definisi Operasional.....	42
D. Skala Pengukuran Variabel .....	43
E. Populasi dan Sampel. ....	44
F. Jenis Data.....	45
G. Teknik Pengumpulan Data.....	46
H. Teknik Analisis Data .....	47

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	53
B. Karakteristik Responden Penelitian .....	66
C. Distribusi Jawaban Responden .....	70



D.	Uji Asumsi Klasik.....	74
E.	Analisis Regresi Linear Berganda.....	78
F.	Pengujian Hipotesis.....	80

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A.	Kesimpulan .....	85
B.	Saran.....	86

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Penelitian Terdahulu .....	33
Tabel 3.1.	Jadwal Penelitian.....	41
Tabel 3.2.	Definisi Operasional.....	43
Tabel 3.3.	Skala Pengukuran.....	44
Tabel 3.4.	Sampel Penelitian.....	45
Tabel 3.5.	Tabel Pengujian Validitas .....	47
Tabel 3.6.	Tabel Pengujian Reliabilitas .....	48
Tabel 4.1.	Deskripsi Pengelolaan Aset.....	71
Tabel 4.2.	Deskripsi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah .....	72
Tabel 4.3.	Deskripsi Kualitas Laporan Keuangan Daerah .....	74
Tabel 4.4.	Tabel Multikolinieritas.....	78
Tabel 4.5.	Tabel Pengujian Pengaruh X dan Y .....	79
Tabel 4.6.	Uji-F.....	81
Tabel 4.7.	Uji-T.....	82
Tabel 4.8.	Koefisien Determinasi.....	83

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Opini Laporan Keuangan Prov. Sumatera Utara.....	7
Gambar 2.1. Kerangka Konseptual.....	40
Gambar 4.1. Struktur Organisasi .....	56
Gambar 4.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin..	66
Gambar 4.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .....	67
Gambar 4.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	68
Gambar 4.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja ..	69
Gambar 4.6. Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan.....	70
Gambar 4.7. Pengujian P-Plot.....	75
Gambar 4.8. Pengujian Normalitas Histogram.....	75
Gambar 4.9. Pengujian Heterokedastisitas .....	77
Gambar 4.10. Analisis Struktur.....	80



**ABSTRAKSI**

**PENGARUH PENGELOLAAN ASET DAERAH DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, SKRIPSI, 2016**

Pengelolaan keuangan negara dan daerah yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap baiknya penyelenggaraan negara dan daerah sebagaimana itu merupakan bagian dari tata kelola yang baik. Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengelola keuangannya sendiri. Wajar saja ketika masyarakat berhak untuk menuntut transparansi dan pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan daerah. Penyusunan laporan keuangan pemerintah merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Perwujudan adanya laporan keuangan pemerintah yang berkualitas baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dibangunlah suatu sistem akuntansi yang baik

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian dalam permasalahan deskriptif merupakan penelitian yang berupaya untuk mengkaji dan menjelaskan bagaimana suatu variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada Kantor BPKAD Provinsi Sumatera Utara bidang akuntansi dan keuangan berjumlah 35 orang (berdasarkan hasil wawancara dan surat penelitian). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melalui penyebaran angket di lokasi penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian signifikansi parsial (uji-t) diperoleh hasil dengan perbandingan t-hitung dan t-tabel ( $3.141 > 1.69$ ) sehingga variabel pengelolaan Aset Daerah memiliki pengaruh yang negative dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, kemudian pada variabel Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah diperoleh hasil yaitu hasil t-hitung  $>$  t-tabel ( $4.136 > 1.69$ ) bahwa variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan hasil pengujian signifikansi simultan diperoleh hasil F-hitung  $>$  F-tabel ( $12.581 > 3.29$ ) bahwa variabel bebas Pengelolaan Aset (X1) dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) secara serempak dan signifikan berpengaruh terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y).

Kata Kunci : Pengelolaan Aset, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kualitas Laporan Keuangan Daerah

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengelolaan keuangan negara dan daerah yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap baiknya penyelenggaraan negara dan daerah sebagaimana itu merupakan bagian dari tata kelola yang baik. Pengelolaan keuangan menjadi poin yang disoroti dikarenakan kekhawatiran masyarakat akan kembali terpuruknya negara dan daerah. Ditetapkannya Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua paket Undang – Undang tersebut membawa perubahan yang signifikan dalam hal pengelolaan keuangan negara dan daerah.

Arus reformasi membawa kebebasan pada masyarakat, seiring dengan hal itu dikeluarkanlah Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah yang mana diberikan hak kepada daerah untuk mandiri dengan daerah otonomnya. Atas dasar Undang - Undang tersebut banyak daerah – daerah yang menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan suatu pemekaran. Dijelaskan dalam undang–undang tersebut otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Dengan adanya otonomi tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengelola keuangannya sendiri. Wajar saja ketika masyarakat berhak untuk menuntut transparansi dan pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kedua peraturan tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dijelaskan lebih lanjut bahwa Pengelolaan Keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Halim (2001: 167) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Namun pada kenyataannya, sudah dua belas tahun sejak otonomi daerah diberlakukan, saat ini kemampuan keuangan



beberapa pemerintah daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat (Adhiantoko, 2013).

Menurut Myer dalam Munawir (2007 : 5), “laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi laba”. Sedangkan menurut Kasmir (2012 : 7), “laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”. Laporan keuangan daerah berarti menguraikan pos-pos laporan keuangan daerah menjadi suatu unit informasi yang lebih kecil dan transparan dan melihat hubungannya dengan pelaksanaan pemerintahan daerah. Penyusunan laporan keuangan pemerintah merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Perwujudan adanya laporan keuangan pemerintah yang berkualitas baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dibangunlah suatu sistem akuntansi yang baik, hal tersebut tercermin dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Aktual Pada Pemerintah Daerah. Namun kualitasnya suatu laporan keuangan pemerintah tidak hanya dapat terwujud hanya dengan sistem akuntansi yang baik dan benar tetapi faktor – faktor seperti kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Maka dari itu, pemahaman aparaturnya atas penerapan PP No.71 Tahun 2010 memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Kepala daerah dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawabannya (Nurlaila, 2014).

Banyaknya kasus mengenai buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menjadi “pukulan telak” bagi pemerintah itu sendiri yang menjadikan pembaharuan terhadap sistem akuntansi pemerintah menjadi tak berarti ketika faktor – faktor yang lain tidak menjadi pertimbangan pemerintah dalam hal menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi terbesar ketiga di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur. Dengan jumlah APBD yang cukup tinggi setiap tahunnya maka sangat diperlukan laporan keuangan yang sangat berkualitas juga untuk setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil audit BPK tahun 2016 ditemukan bahwa terdapat 9 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 1 (11%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 7 (78%) LKPD dan opini Tidak Memberikan Pendapat

atas 1 (11%) LKPD, terhadap 316 objek pemeriksaan kinerja, BPK menyimpulkan kinerja pada umumnya belum sepenuhnya efektif, 279 objek PDDT, BPK menyimpulkan rancangan sistem pengendalian intern (SPI) atas 2 objek pemeriksaan sudah sesuai dan 3 objek pemeriksaan cukup sesuai, terhadap 230 objek pemeriksaan belum/belum sepenuhnya sesuai, serta 44 objek pemeriksaan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara lebih terperinci, BPK mengungkapkan 5.810 temuan yang memuat 7.594 permasalahan, meliputi 1.393 (18%) kelemahan SPI dan 6.201 (82%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp19,48 triliun.

Dari permasalahan ketidakpatuhan itu, sebanyak 1.968 (32%) merupakan permasalahan berdampak finansial senilai Rp12,59 triliun. Perinciannya sebagai berikut; Kerugian negara sebanyak 1.205 (61%) permasalahan senilai Rp1,37 triliun, Potensi kerugian negara sebanyak 329 (17%) permasalahan senilai Rp6,55 triliun, Kekurangan penerimaan sebanyak 434 (22%) permasalahan senilai Rp4,66 triliun. Selain itu, terdapat 4.233 (68%) permasalahan ketidakpatuhan yang tidak berdampak finansial, terdiri atas 617 (14%) penyimpangan administrasi dan 3.616 (86%) ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp6,88 triliun. Atas permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial senilai Rp12,59 triliun, pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara senilai Rp130,78 miliar (1,03%). (Sumber: <http://www.bpk.go.id>) .

Menurut Hidayati, *et al.* (2016), lemahnya pengelolaan Barang Milik/Aset Daerah (BMD) merupakan faktor yang menyebabkan masih banyaknya pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian. Bahkan pada kasus tertentu, ada daerah yang bahkan mengalami penurunan opini dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau Tidak Memberi Pendapat (TMP) yang disebabkan kurang mampuan mewujudkan tata kelola aset/ barang pemerintah daerah secara baik (Ferdianus, 2013). Berikut ini hasil penilaian BPK terhadap hasil laporan keuangan Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2012 -2016



Sumber : <http://medan.bpk.go.id> (2018)

**Gambar 1.1**

### **Opini Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Utara**

Berdasarkan gambar diatas dapat diperoleh informasi bahwa hasil laporan keuangan daerah Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya walaupun masih banyak aspek-aspek yang masih perlu diperhatikan secara lebih intens, salah satunya adalah pengelolaan aset daerah. Aset milik Pemerintah Sumatera Utara bertambah sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera

Utara Tahun Anggaran 2016. Adapun tertulis dalam LHP atas LKPD Provinsi Sumatera Utara tersebut tertulis bahwa aset lancar mengalami kenaikan dari Rp 1.788.323.063.179,83 di Tahun 2015 menjadi Rp 2.125.870.764.482,86 di Tahun 2016, naik sekitar 18,88 %. Aset dari investasi jangka panjang mengalami kenaikan dari Rp 2.171.537.402.069,51 di Tahun 2015 menjadi Rp 2.643.232.669.499,30, di Tahun 2016, naik 21,72 persen. Aset tetap mengalami kenaikan dari Rp 7.869.244.584.156,00 di Tahun 2015 menjadi Rp 8.848.728.141.283,00 di Tahun 2016, naik 12,45 persen. Namun hasil tersebut dinilai masih terdapat kekurangan, dimana berdasarkan hasil sidang paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara menghasilkan keputusan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih kurang optimal dalam mengelola aset Provinsi Sumatera Utara (sumber: <http://medan.tribunnews.com>,2018).

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan sistem akuntansi yang baik, karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang *accountable*, dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem keuangan daerah yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat di tugas dan Instansi Pemerintah tersebut (PP No. 60 Tahun 2008). Perbedaan penerapan sistem akuntansi pada masa pra reformasi dan sistem yang baru adalah sistem akuntansi penatausahaan keuangan daerah yang berlaku pada masa lalu dan saat ini tercermin dalam perhitungan APBD menggunakan sistem pembukuan tunggal yang berbasis kas.

Dalam prinsip basis kas adalah mengakui pendapatan pada saat diterimanya kas dan mengakui belanja atau biaya pada saat dikeluarkannya kas, hal tersebut tentu saja sangat terbatas, karena informasi yang dihasilkan hanya berupa kas yang terdiri dari informasi kas masuk, kas keluar, dan saldo kas. Walaupun pemerintah daerah telah membangun sistem akuntansi dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 64 Tahun 2013 yang mempunyai peranan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas yang mana wajib menjadi acuan oleh seluruh pemerintah daerah, tapi tidak menutup kemungkinan terdapat daerah-daerah yang sistem akuntansinya belum optimal sehingga mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Adanya sistem akuntansi keuangan daerah diharapkan pemerintah daerah dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sehingga pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah daerah mampu menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Disisi lain dengan adanya sistem akuntansi keuangan daerah tersebut, pengelolaan keuangan daerah dapat lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Selain itu kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan dan kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan SAP sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas serta mencegah terjadinya kerugian negara.

Berdasarkan pemaparan fenomena diatas maka penulis menetapkan judul penelitian ini adalah sebagai berikut: **“Pengaruh Pengelolaan Aset Daerah dan**



## **Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara”.**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara masih dianggap belum optimal sehingga peningkatan jumlah aset kurang maksimal. Setiap aset daerah harus dikelola dengan baik baik itu aset bergerak maupun aset tidak bergerak.
2. Terjadinya ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Oleh karena itu perlu adanya perbaikan sistem akuntansi daerah sehingga pengelolaan aset dan keuangan daerah menjadi lebih efektif dan efisien.
3. Hasil laporan keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara masih memiliki kekurangan dalam beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut harus dilengkapi ke depannya agar kualitas laporan keuangan daerah Sumatera Utara dapat lebih baik dibanding periode sebelumnya.

### **C. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengelolaan Aset Daerah Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara?

2. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah Pengelolaan Aset Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh Pengelolaan Aset Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk menganalisis pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk menganalisis pengaruh Pengelolaan Aset Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk:

1. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan penulis mengenai Pengelolaan Aset Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

2. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Penelitian ini berguna sebagai salah satu masukan dalam pengelolaan aset daerah dan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas.
3. Bagi penelitian selanjutnya, untuk memberikan referensi tambahan dengan topik penelitian yang sama.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengelolaan Aset Daerah**

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Aset Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Menurut Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah (2010) menerangkan bahwa aset/barang milik daerah sebagai berikut:

“Aset/barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya”

Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan barang daerah dijelaskan bahwa Barang Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupaun tidak bergerak serta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.

Djalil et.al (2017) menyatakan bahwa :

*“Internal control has a strong influence in an effort to prevent fraud and irregularities”*

Kontrol internal atau pengelolaan yang baik memiliki pengaruh dalam menjegah terjadinya kecurangan. Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat diperoleh informasi bahwa dalam pengelolaan aset daerah sangat diperlukan tindakan pengontrolan secara berkala agar tingkat penggunaan dan pengelolaan aset dapat dijaga. Pengelola aset adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan aset Milik Negara/ Daerah. (PP Nomor 27 Tahun 2014).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:534) kata Pengelolaan, mempunyai 4 pengertian, yaitu :

1. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola;
2. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain;
3. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi;
4. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Pengelolaan aset milik daerah menurut Permendagri 17 Tahun 2007 pengelolaan aset milik daerah adalah rangkaian kegiatan dan/atau tindakan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, dan tuntutan ganti rugi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset milik daerah yaitu suatu rangkaian yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman untuk mengelola semua aset/kekayaan

yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang meliputi kegiatan pengelolaan aset milik daerah.

Pengelolaan aset milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, aset milik daerah merupakan salah satu unsure penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, tentu saja pengelolaan aset milik daerah yang baik akan mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Tentu saja pengelolaan aset milik daerah harus dilakukan dengan baik dan benar. (Oktavia dan Sumini, 2010)

Berdasarkan pengertian yang terdapat di dalam PP No. 27 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Aset Milik Daerah, Barang Milik Negara/Daerah meliputi:

1. Aset yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan
2. Aset yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Aset yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi:

- a. Aset yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. Aset yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. Aset yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; atau
- d. Aset yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.



Dilihat dari mobilitas Asetnya, Mahmudi (2011:146) menyatakan bahwa barang milik daerah dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:

1. Benda tidak bergerak (*real property*), meliputi tanah, bangunan, gedung, bangunan air, jalan dan jembatan, instalasi, jaringan, serta monument/bangunan bersejarah (*heritage*).
2. Benda bergerak (*personal property*), antara lain mesin, kendaraan, peralatan (meliputi: alat berat, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, alat kedokteran, alat laboratorium, dan alat keamanan), buku/perpustakaan, barang bercorak kesenian dan kebudayaan, hewan/ternak dan tanaman, persediaan (barang habis pakai, suku cadang, bahan baku, bahan penolong, dan sebagainya), serta surat-surat berharga.

Pengelolaan Aset Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan Aset Milik Negara/Daerah meliputi: (PP No. 27 Tahun 2014)

1. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;
2. Pengadaan;
3. Penggunaan;
4. Pemanfaatan;
5. Pengamanan dan pemeliharaan;
6. Penilaian;
7. Pemindahtanganan;
8. Pemusnahan;
9. Penghapusan;
10. Penatausahaan; dan
11. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Adapun penjelasan mengenai kegiatan pengelolaan aset milik daerah, sebagai berikut:

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan aset Milik Negara/Daerah untuk menghubungkan pengadaan aset yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
2. Pengadaan. Pengadaan Aset Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Pelaksanaan pengadaan Aset Milik Negara/Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini.
3. Penggunaan. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Aset dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga/ satuan kerja perangkat daerah dan/ atau optimalisasi Aset Milik Negara/ Daerah dengan tidak mengubah status berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan Negara/daerah dan kepentingan umum.
5. Pengamanan dan pemeliharaan. Pengamanan aset milik daerah sebagaimana meliputi: a. pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan; b. pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan

fungsi aset, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang; pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan c. pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan. Pemeliharaan berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Aset. Biaya pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.

6. Penilaian. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Aset Milik Negara/ Daerah pada saat tertentu. Penetapan nilai Barang Milik Negara/Daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat/Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
7. Pemindahtanganan. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Aset Milik Negara/ Daerah. Pemindahtanganan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Pemusnahan. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/ atau kegunaan Aset Milik Negara/ Daerah. Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Aset, untuk Barang Milik Negara; atau Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Aset Milik Daerah.

9. Penghapusan. Penghapusan adalah tindakan menghapus Aset Milik Negara/ Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Aset dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
10. Penatausahaan. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Aset Milik Negara/ Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pembinaan adalah usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervise untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan Aset Milik Daerah secara berdayaguna dan berhasilguna. Pengawasan adalah usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan Aset Milik Daerah, apakah dilakukan sesuai peraturan perundangan-undangan. Pengendalian adalah usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengguna Aset dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawasan intern Pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban.

## **B. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Menurut Rasdianto (2013:6) yang dimaksud dengan sistem akuntansi keuangan daerah adalah :

“Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).”

Menurut [http www.businessdictionary.com](http://www.businessdictionary.com) (2018) Sistem Akuntansi Daerah merupakan:

*“AIS is responsible for providing timely and accurate financial and statistical reports for internal management decision making, and for external parties such as creditors, investors, and regulatory and taxation authorities”.*

Sistem Informasi Akuntansi merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh manajemen dalam menyiapkan laporan keuangan secara tepat dan akurat, yang bertujuan untuk sebagai bahan laporan kepada investor, pemerintah dan dinas perpajakan di suatu negara. Sistem akuntansi keuangan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tersebut, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah atau Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian aktivitas yang tersusun secara sistematis yang dimulai dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan dan elemen dalam

mewujudkan fungsi akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD. Halim et al dalam Sagara (2015) menyatakan:

*Facts show that from the total of 524 local governments, as many as 361 local governments or 68.89% have been using financial information systems, and 163 local governments (31.11%) is not certain the system used in the local financial management. Data of October 2012 provides an overview of financial management used by the government, as many as 223 local governments use local management information systems, 68 local governments using regional finance administration information system, 123 local governments use other systems, and 110 local governments do not use information systems ).*

Dari 524 pemerintah daerah, sebanyak 361 pemerintahan daerah atau 68.89% telah menggunakan sistem informasi keuangan, dan 163 pemerintah daerah (31.11%) belum menggunakan sistem informasi keuangan. Data pada bulan oktober 2012 tentang laporan keuangan daerah, sebanyak 223 pemerintah daerah menggunakan sistem informasi manajemen, 123 pemerintah daerah menggunakan sistem yang berbeda dan 110 daerah yang belum menggunakan sistem informasi manajemen. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa mayoritas daerah di Indonesia telah menjadikan sistem informasi keuangan daerah sebagai hal yang paling penting untuk terus dilaksanakan agar menciptakan laporan keuangan dan sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 menyebutkan bahwa tujuan sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebagai alat untuk mewujudkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh SAP dan kebijakan akuntansi menjadi serangkaian prosedur pencatatan dengan



menggunakan akuntansi *double entry* melalui alat-alatnya berupa buku jurnal, buku besar, neraca saldo dan laporan keuangan itu sendiri.

### **1. Ruang lingkup Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 sistem akuntansi keuangan daerah meliputi :

- a. Sistem akuntansi PPKD. Sistem akuntansi PPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah.
- b. Sistem akuntansi SKPD. Sistem akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.

### **2. Tahapan Penyusunan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, sistem akuntansi keuangan daerah terdiri dari beberapa tahapan diantaranya sebagai berikut :

- a. Identifikasi Prosedur. Tahapan penyusunan sistem akuntansi pemerintah daerah dimulai dari memahami proses bisnis pada pemerintah daerah khususnya terkait siklus pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan siklus

itulah tim penyusun mengidentifikasi prosedur-prosedur apa saja yang harus dibuat.

- b. Menentukan Pihak-Pihak Terkait. Setelah prosedur-prosedur teridentifikasi, ditentukan pihak-pihak yang terkait pada masing-masing prosedur. Masing-masing pihak memiliki peran tersendiri agar prosedur dapat menghasilkan output yang diinginkan.
- c. Menentukan Dokumen Terkait. Setelah prosedur dan pihak terkait ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi dokumen-dokumen yang mengalir pada prosedur sekaligus menentukan pihak-pihak pengguna dokumen tersebut. Dari semua dokumen tersebut diidentifikasi dokumen mana yang valid untuk dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan jurnal.
- d. Menentukan Jurnal Standar. Pada setiap prosedur yang telah ditetapkan tim penyusun menelaah SAP dan kebijakan akuntansi terkait. Berdasarkan penelaahan tersebut tim penyusun menentukan jurnal debit dan kredit yang akan digunakan untuk mencatat.
- e. Menuangkannya Dalam Langkah Teknis. Langkah terakhir dalam penyusunan SAPD ialah menyusun langkah teknis. Langkah teknis merupakan alur pelaksanaan sistem akuntansi yang menjelaskan pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi, dokumen apa saja yang diperlukan, dan bagaimana pihak-pihak tersebut memperlakukan dokumen-dokumen yang terkait. Selain itu, diberikan ilustrasi atau format

pencatatan dalam bentuk penjurnalan akuntansi pada setiap bagan alur atau transaksi yang membutuhkan pencatatan.

### **3. Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, prosedur akuntansi sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas. Prosedur akuntansi penerimaan kas meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas mencakup : a) Surat Tanda Bukti Pembayaran; b) Surat Tanda Setoran (STS); c) Bukti Transfer d) Nota Kredit Bank. Bukti transaksi penerimaan kas dilengkapi dengan : a) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah); b) Surat Ketetapan Retribusi (SKR); c) Bukti Transaksi Penerimaan Kas Lainnya
- b. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas. Prosedur akuntansi pengeluaran kas meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Prosedur pengeluaran kas meliputi : 1) Sub Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas-

- Langsung; 2) Sub Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas-Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas mencakup : a) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); b) Nota Debet Bank; c) Bukti Transaksi Pengeluaran Kas Lainnya. Bukti transaksi prosedur akuntansi pengeluaran kas dilengkapi dengan : a) Surat Perintah Membayar (SPM); b) Surat Penyediaan Dana (SPD); c) Kuitansi Pembayaran dan Bukti Tanda Terima Barang/Jasa.
- c. Prosedur Akuntansi Aset. Prosedur akuntansi aset meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset berupa bukti memorial dilampiri dengan : a) Berita Acara Penerimaan Barang; b) Surat Keputusan Penghapusan Barang; c) Surat Keputusan Mutasi Barang ;d) Berita Acara Pemusnahan Barang; e) Berita Acara Serah Terima Barang; f) Berita Acara Penilaian; g) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
- d. Prosedur Akuntansi Selain Kas. Prosedur akuntansi selain kas meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Prosedur akuntansi selain kas mencakup : 1) Koreksi Kesalahan

Pembukuan; 2) Penyesuaian Terhadap Akun Tertentu Dalam Rangka Menyusun Laporan Keuangan Pada Akhir Tahun; 3) Reklasifikasi Belanja Modal Menjadi Aset Tetap; 4) Reklasifikasi Akibat Koreksi Yang Ditemukan Dikemudian Hari. Bukti transaksi prosedur akuntansi selain kas berupa bukti memorial dilampiri dengan : a) Berita Acara Penerimaan Barang; b) Surat Keputusan Penghapusan Barang; c) Surat Keputusan Mutasi Barang; d) Berita Acara Pemusnahan Barang; e) Berita Acara Serah Terima Barang; f) Berita Acara Penilaian; g) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan; h) Sistem Pencatatan.

### **C. Laporan Keuangan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis AkruaI dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Menurut Gibson dalam Yadiati (2017) laporan keuangan adalah:

*“financial statements aimed to provide useful information to stakeholder in business and economic decision making”*

Laporan keuangan ditujukan untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan dan sebagai dasar acuan pembuatan keputusan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mendefinisikan laporan keuangan dalam PSAP 01 adalah sebagai berikut :

“Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.”

### **1. Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

## **2. Peranan Laporan Keuangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah memiliki peranan sebagai berikut :

- a. Akuntabilitas. Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- b. Manajemen. Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi. Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
- d. Keseimbangan Antargenerasi. Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah

generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

- e. Evaluasi Kinerja. Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

### **3, Pengguna Laporan Keuangan**

Menurut Earl R Wilson, et al. (2016:355) pengguna utama laporan keuangan luar pemerintah terdiri dari :

- a. *Citizens.*
- b. *Legislative.*
- c. *Oversight bodies.*
- d. *Creditors.*

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas yaitu:

- a. Masyarakat.
- b. Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa.
- c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman.
- d. Pemerintah.

### **4. Komponen Laporan Keuangan**

Menurut Muller, et al. (2016:53) komponen laporan keuangan terdiri dari :



- a. *A statement of financial position.*
- b. *A statement of financial performance.*
- c. *A statement of changes in net assets/equity.*
- d. *A cash flow statement.*
- e. *When the entity makes publicly available its approved budget, a comparison of budget and actual amounts either as separate additional financial statements or as a budget column in the financial statements.*
- f. *Notes, comprising a summary of significant.*

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan keuangan pokok terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL).
- c. Neraca.
- d. Laporan Operasional (LO).
- e. Laporan Arus Kas (LAK).
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

## **5. Karakteristik Laporan Keuangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki adalah sebagai berikut :

- a. Relevan. Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan

keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan adalah :

- 1) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
  - 2) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
  - 3) Tepat waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
  - 4) Lengkap. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
- b. Andal. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- 1) Penyajian Jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
  - 2) Dapat Diverifikasi (*verifiability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
  - 3) Netralitas. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
- c. Dapat Dibandingkan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
- d. Dapat Dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu,

pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

## **6. Kendala Penyajian Laporan Keuangan Yang Berkualitas**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 kendala dalam menyajikan informasi keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi keuangan yang berkualitas. Akibat keterbatasan (limitations) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam menyajikan informasi keuangan pemerintah, yaitu:

- a. Materialitas. Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.
- b. Pertimbangan biaya dan manfaat. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi

yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain di samping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan.

- c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian yang telah dilakukan, yang berkaitan dengan pengaruh pengelolaan aset daerah dan sistem akuntansi daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah, yaitu sebagai berikut:

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Permadi (2013)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dari hasil penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2	Poae, et.al (2017)	Pengaruh Pengelolaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara

	<p>Barang milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.</p>	<p>parsial penilaian, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian BMD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan perencanaan BMD memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa perencanaan, penilaian, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian BMD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Nilai dari koefisien determinasi menunjukkan bahwa perencanaan, penilaian, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian BMD bersama-sama berkontribusi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu sebesar 36,5%, sisanya 63,5</p>
--	---	--

			% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model penelitian
3	Rizqi (2017)	Pengaruh Pengelolaan Aset Daerah (Psap 07 Aset Tetap) Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bandung)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah dan sistem akuntansi daerah secara positif dan signifikan mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah.
4	Sari, (2016)	Pengaruh Sistem Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah	Penelitian ini menyatakan menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan besarnya pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dalam memberikan kontribusi pengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah

			sebesar (92,7%). Semakin tinggi penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, maka semakin tinggi akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5	Lestari (2016)	Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Efektivitas sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah. Artinya efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan secara signifikan. Semakin baik sistem pengendalian internal pemerintah maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemer

**Sumber: Hasil Olahan Penulis (2018)**

### **E. Kerangka Konseptual**

Di era reformasi, tuntutan transparansi dan akuntabilitas akan penyelenggaraan negara selalu digalakan tidak terkecuali pengelolaan keuangan negara. Tuntutan tersebut sejalan dengan perkembangan zaman yang



mengharuskan terciptanya tata kelola yang baik (*good governance*) di lingkungan pemerintahan, yang transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian dari prinsip *good governance* tersebut. Reformasi dalam aspek pengelolaan keuangan negara menjadi aksi nyata dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua paket Undang – Undang tersebut membawa perubahan yang signifikan dalam hal pengelolaan keuangan negara.

Transparansi dan akuntabilitas tidak hanya menjadi *concern* pemerintah pusat, tetapi menjadi *concern* di semua level dan bagian dari pemerintahan yang didalamnya termasuk pemerintah daerah. Sebagaimana dengan adanya otonomi daerah yang merupakan salah satu dampak dari reformasi, hal tersebut dapat dilihat dengan dikeluarkannya Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah menghendaki adanya daerah untuk melakukan suatu pemekaran serta menyelenggarakan pengelolaan keuangannya secara mandiri.

Dengan adanya otonomi tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengelola keuangannya sendiri. Wajar saja ketika masyarakat berhak untuk menuntut transparansi dan pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kedua peraturan tersebut menjelaskan

bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dijelaskan lebih lanjut bahwa Pengelola Keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang menjadi tuntutan masyarakat dapat diwujudkan pemerintah daerah dengan menyajikan laporan keuangan. Tentunya hal tersebut dapat terjadi jika entitas pemerintah daerah mampu menyajikan, mengoperasikan serta menjaga kualitas laporan keuangan.

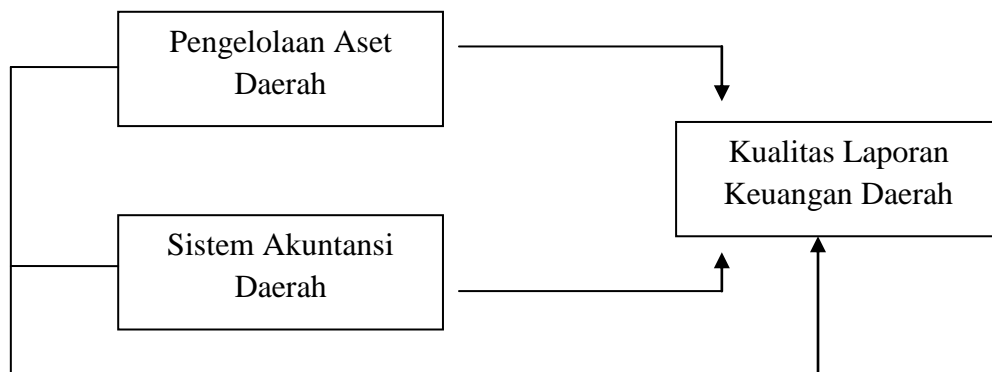
### **1. Pengaruh Pengelolaan Aset Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Lahirnya Pemendagri No. 17 Tahun 2007 diharapkan setiap pemerintah daerah dapat mengelola barang milik daerahnya dengan baik. Tidak sedikit barang milik daerah yang berpindah tangan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Dikarenakan penyajian barang milik daerah yang tidak didukung dengan rincian daftar aset maupun dokumen berupa daftar inventarisasi dan penilaian aset tersebut. Atau dengan kata lain pengelolaan barang milik daerah yang kurang baik. Kasus tersebut merupakan salah satu kendala untuk mencapai opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*). Padahal pengelolaan barang milik daerah sangat berpengaruh terhadap laporan keuangan. Hal ini diperkuat dengan adanya Pernyataan Nomor 07 dalam Standar Akuntansi Pemerintahan yang

menyatakan bahwa “aset tetap merupakan suatu bagian aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca”. Dalam penelitian Poae et.al (2017) menemukan bahwa pengelolaan aset daerah berpengaruh positif terhadap laporan keuangan daerah.

## **2. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Kualitas informasi keuangan berbanding lurus dengan kewajaran penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan dapat dihasilkan dari adanya suatu sistem akuntansi. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan besarnya pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dalam memberikan kontribusi pengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar (92,7%). Semakin tinggi penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, maka semakin tinggi akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (Sari, 2016). Hal yang sama dikemukakan Permadi (2013) bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berikut ini adalah gambar kerangka konseptual dalam penelitian ini:



Sumber: Hasil Olahan Penulis (2018)

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

## **F. Hipotesis**

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Aset Daerah Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
3. Pengelolaan Aset Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Juliandi (2013:56) penelitian dalam permasalahan deskriptif merupakan penelitian yang berupaya untuk mengkaji dan menjelaskan bagaimana suatu variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

#### B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor BPKAD Provinsi Sumatera Utara. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2018 - Oktober 2018.

**Tabel 3.1. Jadwal Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																
2	Pra Riset	■	■	■													
3	Penyusunan Proposal			■													
4	Seminar Proposal				■												
5	Pengambilan Data					■	■	■	■	■	■	■	■				
6	Pengolahan Data									■	■	■	■	■	■	■	■
7	Penulisan Skripsi													■	■	■	■
8	Bimbingan Skripsi														■	■	■
9	Sidang																■

### **C. Definisi Operasional**

Definisi Operasional adalah menjelaskan karakteristik dari obyek kedalam elemen-elemen yang dapat diobservasi yang menyebabkan konsep dapat diukur dan dioperasionalkan ke dalam penelitian.(Erlina, 2011).

#### **1. Variabel Dependen**

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel sebab atau variabel bebas (Erlina, 2011). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah : Kualitas Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

#### **2. Variabel Independen**

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah : Pengeloaan Aset Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

**Tabel 3.2**  
**Operasionalisasi Variabel Penelitian**

No	Variabel Penelitian	Indikator Variabel	Skala
1	<b>Pengelolaan Aset Daerah (X1)</b>	1. Fungsional, 2. Kepastian Hukum, 3. Tansparansi, 4. Efisiensi, 5. Akuntabilitas, 6. Kepastian Nilai	Likert
2	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2)	1. Indentifikasi Prosedur 2. Pihak-pihak terkait 3. Dokumen Terkait 4. Jurnal Standar	Likert
3	Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami	Likert

Sumber : Hasil Olahan Penulis (2018)

#### **D. Skala Pengukuran Variabel**

Menurut Sugiyono (2012), Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor, misalnya :

**Tabel 3.3**  
**Skala Pengukuran**

No.	Pertanyaan	Skor
1.	Sangat Setuju (SS)	5
2.	Setuju (S)	4
3.	Kurang Setuju (KS)	3
4.	Tidak Setuju (TS)	2
5.	Sangat Tidak setuju (STS)	1

*Sumber : Data Diolah Peneliti, 2018*

## **E. Populasi dan Sampel Penelitian**

### **1. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Metode yang digunakan untuk mencari populasi dalam penelitian ini menggunakan metode *target population* dengan syarat-syarat sebagai berikut: pegawai yang bekerja pada Kantor BPKAD Provinsi Sumatera Utara bidang akuntansi dan keuangan berjumlah 35 orang (berdasarkan hasil wawancara dan surat penelitian).

### **2. Sampel Penelitian**

Menurut Erlina (2011) sampel adalah bagian populasi yang digunakan untuk memperkirakan karakteristik populasi. Teknik sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah teknik *probability sampling* yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.



Teknik pengambilan sampel jenuh yaitu dengan menggunakan seluruh populasi penelitian menjadi sampel penelitian. Berikut ini adalah data pegawai BPKAD Provinsi Sumatera Utara berdasarkan jabatan yang menjadi sampel penelitian ini:

**Tabel 3.4**  
**Sampel Penelitian**

No	Jabatan	Jumlah
1	Akuntansi	20 Orang
2	Keuangan	15 Orang
<b>Jumlah</b>		35 orang

*Sumber: Hasil Observasi Penulis (2018)*

#### **F. Jenis Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Data primer

Kata primer merupakan lawan kata dari sekunder, dimana artinya asli atau utama atau secara langsung dari sumbernya. Jadi pengertian data primer adalah data asli yang dikumpulkan oleh periset untuk menjawab masalah riset secara khusus. Dalam riset keuangan, data primer diperoleh secara langsung dari sumbernya, sehingga periset merupakan tangan pertama yang memperoleh data tersebut (Istijanto,2005). Data primer dalam penelitian ini adalah jawaban atau respon responden terhadap kuesioner yang diberikan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya (Juliandi, 2013:67). Data sekunder dalam penelitian ini adalah data jumlah pegawai yang sesuai dengan kriteria sampel yang telah ditentukan.

## **G. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data-data, informasi, keterangan-keterangan serta fakta-fakta yang dibutuhkan untuk penelitian ini, maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Kuesioner

Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang dibuat oleh peneliti berdasarkan indikator-indikator dari variabel penelitian. Kuesioner diberikan kepada responden yang merupakan pegawai BPKAD Provinsi Sumatera Utara untuk mendapatkan data primer yang dibutuhkan oleh peneliti.

### 2. Wawancara

Wawancara dilaksanakan di objek penelitian untuk melengkapi temuan yang telah diperoleh dari kuesioner penelitian yang berhubungan dengan fenomena penelitian. (Sugiyono, 2012:93)

## H. Pengujian Instrumen Data Penelitian

### 1. Uji Validitas

Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah ada pertanyaan-pertanyaan pada kuisisioner yang harus dibuang/diganti karena dianggap tidak relevan. Kuisisioner riset dikatakan valid apabila instrumen tersebut benar-benar mampu mengukur besarnya nilai variabel yang diteliti (Sugiyono, 2012). Pengujian validitas dilaksanakan di BPKAD Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah responden 30 orang (0,3061).

- a. Jika  $r$  hitung positif dan  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel maka butir pertanyaan tersebut valid.
- b. Jika  $r$  hitung negatif atau  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel maka butir pertanyaan tersebut tidak valid.

**Tabel 3.4 Hasil Pengujian Validitas**

No	<i>Corrected Item-Total Correlation</i> ( $r$ hitung)			Keterangan
	Pengelolaan Aset	SIAKD	Kualitas Laporan Keuangan Daerah	
1	0.922	0.466	0.537	Valid
2	0.874	0.481	0.543	Valid
3	0.627	0.965	0.677	Valid
4	0.954	0.962	0.745	Valid
5	0.625	0.914	0.811	Valid
6	0.735	0.561	0.547	Valid
7	0.457	0.720	0.527	Valid
8	0.573	0.953	0.792	Valid
9	0.893	0.497	0.498	Valid
10	0.499	0.903	0.553	Valid
11	0.895	0.949	0.792	Valid
12	0.872	0.953		Valid
13	0.881			Valid
14	0.899			Valid

Sumber: Hasil Olahan Data (2018)

Berdasarkan pengujian validitas diatas maka dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen pernyataan dari setiap variabel penelitian ini dapat dikatakan valid karena nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel.

## 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama (Sugiyono,2012). Tujuan pengujian ini untuk melihat masing-masing instrumen yang digunakan dengan koefisien *cronbach alpha*. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha*  $>$  0,6. Pengujian reliabilitas dilaksanakan di BPKAD Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah responden 30 orang.

**Tabel 3.5 Hasil Uji Reliabilitas**

No	Cronbach Alpha			Keterangan
	Pengelolaan Aset	SIAKD	Kualitas Laporan Keuangan Daerah	
1	0.956	0.982	0.884	Reliabel

Sumber: Hasil Olahan Data (2018)

Berdasarkan tabel pengujian reliabilitas maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dapat dikatakan reliabel karena nilai *cronbach alpha* (pada setiap variabel penelitian)  $>$  0.60.

## 3. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk menjelaskan setiap temuan yang diperoleh dari penelitian dengan menggunakan fungsi-fungsi statistik. Dalam

penelitian ini yang termasuk kedalam statistic deskriptif adalah karakteristik responden dan distribusi jawaban responden.

#### **a. Pengujian Asumsi Klasik**

##### **1) Uji Normalitas Data**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali,2011). Untuk menguji apakah sampel penelitian merupakan jenis distribusi normal maka digunakan pengujian menggunakan analisis statistik yaitu Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test terhadap masing- masing variabel. Suatu data dikategorikan sebagai distribusi normal jika data tersebut tingkat signifikansi ( $\alpha$ )  $> 0.05$ . Hasil pengujian didukung oleh analisis grafik dilihat melalui penyebaran titik pada sumbu diagonal P-Plot dan grafik histogram.

##### **2) Uji Multikolinieritas**

Menurut Ghozali (2011) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Pada model regresi yang baik antar variabel independen seharusnya tidak terjadi kolerasi. Pendekatan yang digunakan ada dua yaitu dengan melihat nilai *tolerance* dan lawannya dengan uji tes *Variance Inflation Factor* (VIF), dengan analisis sebagai berikut:

- a) Jika nilai *tolerance*  $> 0,10$  dan VIF  $< 10$ , maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

- b) Sebaliknya, jika nilai *tolerance*  $< 0,10$  dan *VIF*  $> 10$ , maka terdapat multikolinieritas.

### 3) Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2011). Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut sebagai homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas. Untuk melihat ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan menggunakan analisis statistik yaitu uji glesjer. Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka tidak mengalami gangguan heterokedastisitas, sebaliknya nilai jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka mengalami gangguan heterokedastisitas. Mendeteksi heterokedastisitas juga dapat dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka ini mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

### 3. Pengujian Hipotesis

#### a. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan besaran pengaruh antara

variabel independen dengan variabel dependen (Ghozali, 2011). Analisis regresi berganda yang dilakukan dalam penelitian menggunakan metode model sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \dots\dots\dots (1)$$

Dimana :

$\alpha$  : Koefisien Konstanta

$\beta_1$ -  $\beta_3$  : Koefisien Regresi

Y : Kualitas Laporan Keuangan Daerah

X1 : Pengelolaan Aset Daerah

X2 : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

e : Error term

#### **b. Uji Koefisien Determinasi**

Menurut Ghozali (2011) Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai *Adjusted R Squared* ( $R^2$ ) adalah koefisien determinasi yaitu koefisien yang menjelaskan seberapa besar proporsi variasi dalam dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel - variabel independen secara bersama-sama. Nilai  $R^2$  koefisien determinasi berkisar antara 0 sampai 1. Nilai  $R^2$  sama dengan nol ( $R^2 = 0$ ) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Bila  $R^2$  semakin besar mendekati 1 menunjukkan semakin kuat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan bila  $R^2$  semakin kecil mendekati 0 menunjukkan semakin kecil pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

**c. Uji Signifikansi Parsial (*T – test*)**

Menurut Ghozali (2011) Uji parsial digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Pengujian dilakukan menggunakan uji-t dengan tingkat pengujian pada  $\alpha = 5\%$  derajat kebebasan (*degree of freedom*). Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

Ho diterima jika  $T \text{ hitung} < T \text{ tabel}$

Ha diterima jika  $T \text{ hitung} > T \text{ tabel}$

**d. Uji Signifikansi Simultan (*F-test*)**

Menurut Ghozali (2011) pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pengujian dilakukan menggunakan uji – f dengan tingkat pengujian pada  $\alpha = 5\%$  derajat kebebasan (*degree of freedom*). Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

Ho diterima jika  $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$

Ha diterima jika  $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Umum**

Pada zaman pemerintahan Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu pemerintahan yang bernama *Gouvernement van Sumatera* dengan wilayah meliputi seluruh pulau Sumatera, dipimpin oleh seorang Gubernur berkedudukan di kota Medan. Setelah kemerdekaan, dalam sidang pertama Komite Nasional Daerah (KND), Provinsi Sumatera Utara kemudian dibagi menjadi tiga sub provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan penggabungan dari tiga daerah administratif yang disebut Keresidenan, yaitu: Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Sumatera Timur dan Keresidenan Tapanuli. Dengan diterbitkannya undang-undang Republik Indonesia (R.I) No. 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948, ditetapkan bahwa Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah dan Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 15 April 1948 selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara.

Pada awal tahun 1949, dilakukan kembali reorganisasi pemerintahan di Sumatera. Dengan Keputusan Pemerintah Darurat R.I Nomor 22/pem/PDRI pada tanggal 17 Mei 1949, jabatan Gubernur Sumatera Utara diadakan. Selanjutnya dengan Ketetapan Pemerintah Darurat R.I pada tanggal 17 Desember 1949, dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur. Kemudian,

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 Tahun 1950 pada tanggal 14 Agustus 1950, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara.

Dengan Undang-undang R.I No.24 Tahun 1956 yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956, dibentuk Daerah Otonom Provinsi Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara sebahagian menjadi wilayah Provinsi Aceh. Motto Daerah adalah Berkarya, Hidup Sejahtera, Mulia Berbudaya. Sementara BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Provinsi Sumatera Utara adalah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang baru dibentuk berdasarkan tindak lanjut Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan pergantian nama yang baru di kantor Gubernur Sumatera Utara. Sebelum berganti nama menjadi BPKAD adalah dulunya dinamakan Biro Keuangan. Sedangkan ASN (Aparatur Sipil Negara) terdiri dari eks Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Setdaprovsu dan sebagian berada di Biro Umum. Adapun Visi dan Misi terlampir sebagai berikut:

**Visi:**

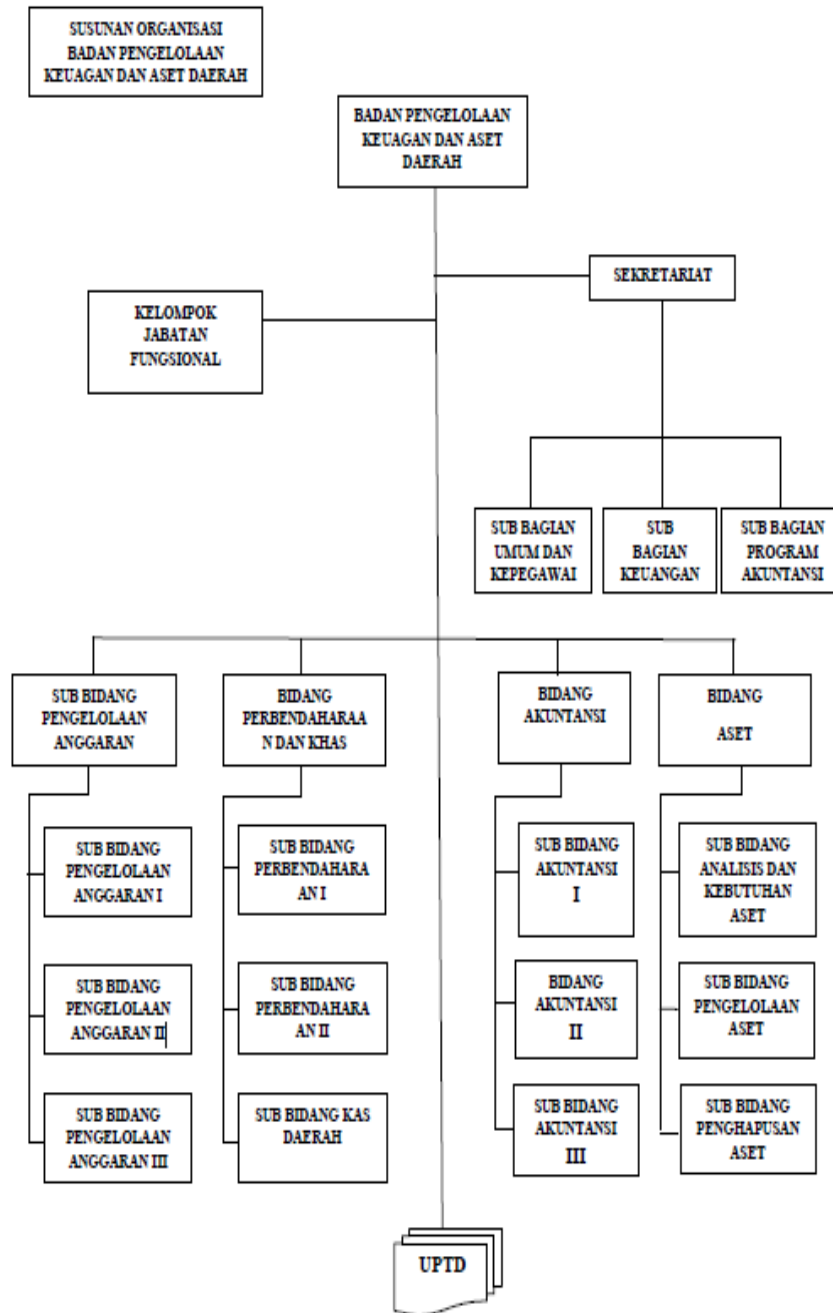
Menjadikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai pembantu pengelola barang milik daerah yang transparan dan berdaya saing dengan meningkatkan sumber daya aparatur yang mempunyai pengetahuan pengelolaan barang milik daerah yang berbasis teknologi sehingga terpenuhinya pengelolaan barang milik daerah yang berkualitas.

**Misi:**

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana yang berkualitas sesuai dengan perkembangan teknologi.
- b. Bertambahnya sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan dalam pengelolaan barang milik daerah yang berbasis teknologi sehingga terciptanya tertib pengelolaan barang milik daerah untuk menuju wajar tanpa pengecualian.
- c. Meningkatkan kinerja seluruh Kesatuan Kerja Perangkat Daerah SKPD dengan dukungan kualitas dan kuantitas barang milik daerah.

## **2. Struktur Organisasi**

Setiap instansi perkantoran pasti memiliki struktur organisasi, struktur organisasi sangat penting di dalam perkantoran karena berfungsi sebagai landasan bagi seluruh fungsi yang ada dalam organisasi untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari setiap fungsi. Struktur organisasi dapat dilihat pada Bagan dibawah ini Struktur Organisasi dapat dilihat sebagai berikut :



**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi**

Adapun uraian tugas dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas membantu pemerintah provinsi Sumatera Utara dalam

menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atas pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan aset, analisis dan kebutuhan aset, pengelolaan aset dan penghapusan aset.

b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyelenggaraan persiapan dan mengkoordinasikan penyusunan konsep kebijakan Kepala Daerah dalam pembinaan, fasilitas, monitoring, evaluasi, koordinasi dan pengendalian aset, distribusi, penyimpanan, penghapusan dan perawatan.
- 2) Penyelenggaraan fasilitas, koordinas, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah di bidang aset, analisis dan kebutuhan aset, pengelolaan aset, dan penghapusan aset.

c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, mempunyai uraian tugas adalah :

- 1) Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Menyelenggarakan penetapan dan penyajian bahan atau data dalam urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- 3) Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan perencanaan dan program kegiatan badan sesuai ketentuan perundang-undangan.

- 4) Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan standar, norma dan kriteria penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
  - 5) Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitas, monitoring, evaluasi, pengendalian dan kebijakan urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah di bidang aset, analisis dan kebutuhan aset, pengelolaan aset dan penghapusan aset.
  - 6) Menyelenggarakan pengkajian, analisa dan meneliti pengelolaan urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah di bidang aset, analisis dan kebutuhann aset, pengelolaan aset dan penghapusan aset.
- d. Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dibantu oleh : Bidang Aset yang memiliki sub Bidang terdiri atas Sub Bidang Analisis dan Kebutuhan Aset,Sub Bidang Pengelolaan Aset, Sub Bidang Penghapusan Aset.
- 1) Sub Bidang Analisis dan Kebutuhan Aset
    - i. Melaksanakan pembinaan bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkungan Sub Bagian/Seksi Analisis Kebutuhan.
    - ii. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pengendalian dan kebijakan dalam menyelenggarakan urusan analisa kebutuhan.
    - iii. Melaksanakan pengumpulan, penyusunan, dan penyajian bahan/ data perencanaan program dan kegiatan urusan

analisa kebutuhan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- iv. Menyelenggarakan, menyusun, meneliti, menyiapkan dan menghimpun Rencana Kebutuhan BMD (RKBMD) pengadaan dan Rencana Kebutuhan BMD Pemeliharaan (RKBMD) yang disusun berdasarkan standar harga (besaran harga), standar kebutuhan (satuan jumlah barang), dan standar barang (spesifikasi) untuk satu tahun anggaran dan masing-masing SKPD.
- v. Menyelenggarakan, menyusun (tim) penyusunan standar harga, standar kebutuhan dan standar barang bersama dinas terkait dan ditetapkan dengan keputusan Gubernur Sumatera Utara.
- vi. Menyelenggarakan meneliti pengalihan status penggunaan BMD kepada pengguna barang lainnya dan memproses persetujuan Gubernur.
- vii. Menyelenggarakan, menyusun dan menyiapkan Rencana Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKD-BMD) pengadaan dan RDKP-BMD pemeliharaan menurut jenis barang, pekerjaan, banyak atau volume, perkiraan waktu dan biaya serta pelaksanaan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RAK) APBD masing-masing SKPD.

- viii. Menyelenggarakan meneliti dan permohonan persetujuan tentang penggunaan sementara BMD kepada pengguna barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa mengubah status penggunaan barang yang ada.
- ix. Menyelenggarakan, meneliti rencana tahunan pengadaan dan pemeliharaan setelah APBD ditetapkan yang dituangkan/tercermin dalam Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) masing-masing SKPD yang harus sesuai dengan RKA masing-masing SKPD.
- x. Menyelenggarakan, meneliti usulan penggunaan barang untuk ditetapkan Gubernur, penetapan status penggunaan barang dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tupoksi SKPD pengusul.
- xi. Menyelenggarakan Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) SKPD yang harus sesuai dengan RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan yang telah ditetapkan pengelolaan barang.
- xii. Melakukan persiapan penyusunan prosedur pengajian perencanaan kebutuhan barang dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.
- xiii. Penyusunan penetapan standar barang, standar kebutuhan dan standar harga.



- xiv. Melaksanakan identifikasi penelahan dan review atas data/bahan usulan RKBMD dan RKBMD yang diajukan SKPD di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.
- xv. Melaksanakan penyusunan rekapitulasi/ daftar RKBMD dan RKPBMMD untuk ditetapkan menjadi keputusan Gubernur Sumatera Utara.

## 2) Sub Bidang Pengelolaan Aset

- i. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkungan Sub Bagian/Seksi Pengelolaan Aset.
- ii. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan perencanaan, program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan pengelolaan aset sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- iii. Melaksanakan pengumpulan, penyusana, pengolahan dan penyajian data BMD bergerak dan tidak bergerak berupa tanah, peralatan kantor/ mesin, gedung dan bangunan, jalan jembatan jaringan, aset pengerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- iv. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitas dan evaluasi melakukan catatan BMD yang berada dalam penguasaan pengelolaan, penggun/kuasa pengguna barang sesuai penggolongan dan kodefikasi barang ke dalam Kartu

Inventaris Barang (KBA s/d F) dan melakukan pembuatan KR (Kartu Inventaris Ruangan).

- v. Menyelenggarakan pembinaan koordinasi dan melakukan inventarisasi BMD secara lengkap dan akurat meliputi lokasi, jenis, *merk*, *type*, jumlah, ukuran, harga, tahun, pembelian, asal perolehan dan kondisi barang.
- vi. Menyelenggarakan pembinaan koodinasi dan menghimpun dan merekapitulasi laporan penggunaan barang semesteran, tahunan dari 5 (lima) Tahunan.
- vii. Menyelenggarakan pembinaan koordinasi, penyusunan dan merekapitulasi laporan semesteran dan tahunan sebagai bahan pendukung penyusunan neraca daerah.
- viii. Menyelenggarakan permohonan kooordinasi dan monitoring penerimaan semua barang bergerak, tidak bergerak dari hasil pengadaan oleh pengurus barang sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- ix. Menyelenggarakan pembina, koordinasi dan monitoring penyimpanan barang oleh pengurus barang dalam rangka pengurusan penyelenggaraan dan penatausahaan barang persediaan dan melakukan pemeriksaan pembukuan dan pencatatan serta stock opname secara berkala ataupun terhadap barang persediaan yang ada.
- x. Menyelenggarakan pembinaan koordinasi dan monitoring penyaluran barang milik daerah ke unit pemakai dan

menyelenggarakan tertib administrasi penyaluran dan membuat laporan realisasi penyaluran persediaan (BMD).

- xii. Menyelenggarakan pembinaan koordinasi dan melakukan inventarisasi BMD, kodifikasi dan verifikasi fisik dan administrasi sesuai ketentuan dan aturan yang ditetapkan.
- xiii. Melaksanakan penyusutan kegiatan sensus Barang Milik Daerah sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- xiv. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran BMD serta mengelola barang persediaan
- xv. Melaksanakan sosialisasi bimbingan teknis, koordinasi, konsultasi dan asistensi dalam rangka penatausahaan BMD.
- xvi. Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan BUMD.

### 3) Sub Bidang Penghapusan

- i. Menyelenggarakan Pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi meneliti dan melakukan proses pemindahtanganan BMD (penjualan, ruislag, hibah dan atau penyertaan modal) atas usulan SKPD sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- ii. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi meneliti dan melakukan proses pemusnahan terhadap BMD (Barang Milik Daerah) yang sudah tidak dapat dipindahtangankan atas usulan SKPD sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- iii. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, meneliti dan melakukan proses penghapusan BMD sebagai tindak lanjut pemindahtanganan, pemusnahan, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan atau sebab lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- iv. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan evaluasi dan melakukan penilaian dan atau penaksiran harga BMD dengan tim/ panitia dalam rangka pemindahtanganan pemusnahan dan pemusnahan BMD sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- v. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan penjualan sisa bongkaran BMD dengan SKPD sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- vi. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penjualan langsung maupun lelang umum BMD sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- vii. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, dan arahan kepada Staf pada lingkungan Sub Bagian/ Seksi Pemeliharaan dan Penghapusan.
- viii. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka pengamanan,

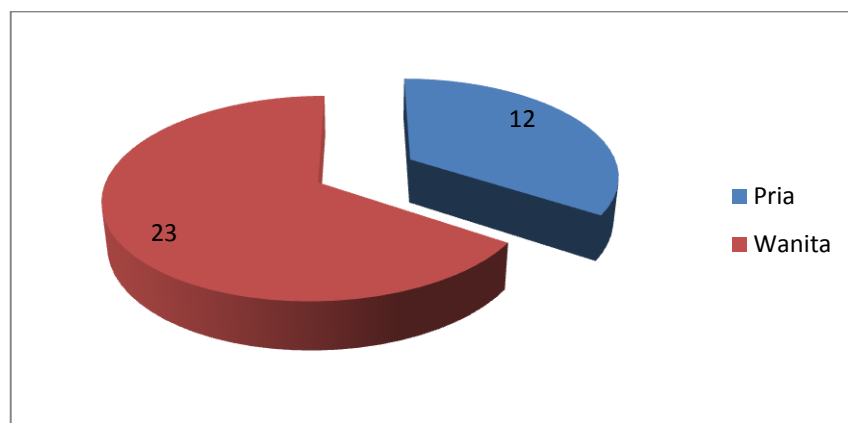
pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sesuai penghapusan barang milik daerah sesuai penghapusan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

- ix. Melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan dokumen kendaraan dinas dan penarikan kendaraan dinas yang akan diproses pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku.
- x. Melakukan pembinaan dan koordinasi pensertifikasian tanah dari pemasangan plank, serta penertiban BMD dengan SKPD dan instansi terkait.
- xi. Melaksanakan koordinasi, inventarisasi, dan identifikasi data perencanaan pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan barang bergerak sesuai keputusan dan peraturan yang berlaku.
- xii. Melaksanakan persiapan dan penyelenggaraan penjualan Barang Milik Daerah (penjualan langsung atau lelang umum).
- xiii. Melaksanakan hubungan kerjasama dalam rangka penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan dengan instansi terkait.
- xiv. Melaksanakan pengkajian, penelitian dan memberikan masukan, saran, dan pendapat kepada atasan/pimpinan dalam rangka pengamanan dan penghapusan BMD

- xv. Melaksanakan rapat-rapat internal dan eksternal dalam rangka urusan pengelolaan aset daerah.

## B. Karakteristik Responden Penelitian

Pada sub-bab ini peneliti akan memaparkan tentang gambaran umum tentang responden penelitian. Dimana yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah pegawai di Kantor BPKAD Provinsi Sumatera Utara bidang akuntansi dan keuangan berjumlah 35 orang, yang akan dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan terakhir, lama bekerja, dan latar belakang pendidikan.



**Gambar 4.2**

### **Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

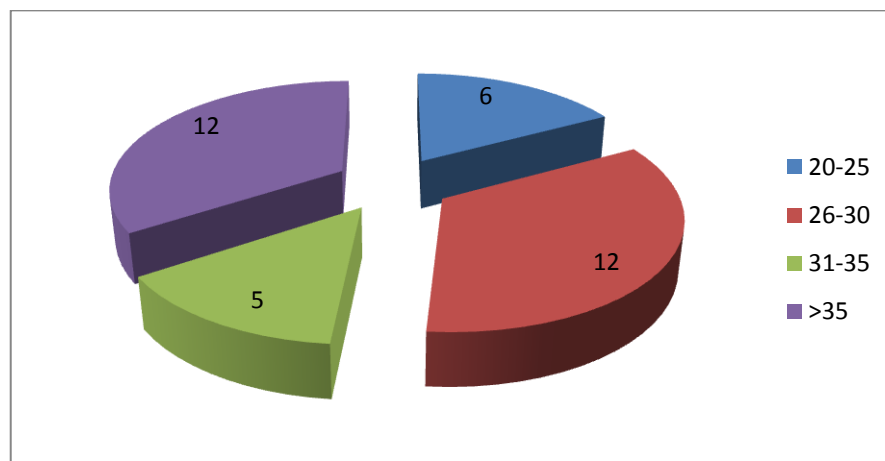
Sumber: Hasil Olahan Data (2018)

Pada gambar 4.2 diperoleh informasi bahwa jumlah pegawai wanita sebesar 23 orang yang menjadi responden dalam penelitian ini lebih banyak dari pria hanya sejumlah 12 orang dari sampel. Hal tersebut diakibatkan oleh dua faktor seperti:

1. Kebutuhan tenaga kerja wanita untuk bidang keuangan khususnya untuk bagian teknis seperti: akuntansi dan audit.

2. Tenaga kerja wanita umumnya bekerja di bagian administrasi dan keuangan yang tidak membutuhkan jumlah pegawai yang lebih besar.

Berikut ini adalah karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhirnya :

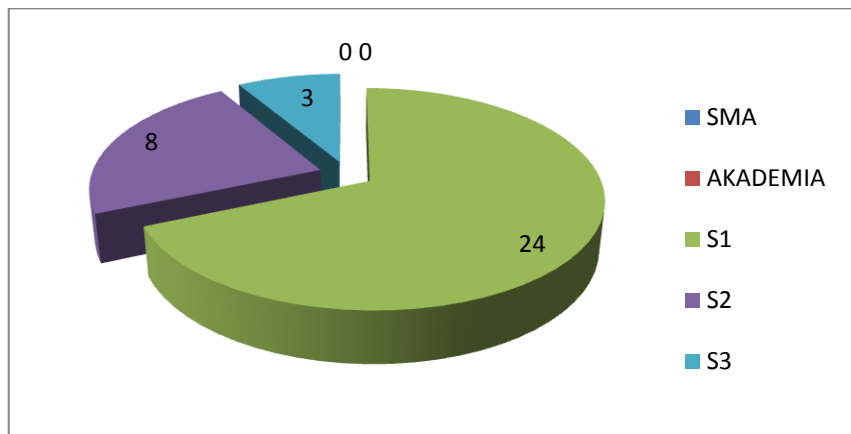


**Gambar 4.3**

**Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

Sumber: Hasil Olahan Data (2018)

Berdasarkan gambar 4.3 diperoleh informasi bahwa mayoritas pegawai yang berkerja di BPKAD berusia diantara 20-25 tahun, yang berjumlah 6 orang. Sedangkan pegawai yang berusia 26-30 tahun berjumlah 12 orang dan pegawai yang berusia 31-35 tahun berjumlah 5 orang dan > 35 Tahun berjumlah 12 orang. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa mayoritas pegawai yang bekerja di BPKAD masih dalam kelompok umur yang produktif (26-42 tahun). Pada gambar selanjutnya akan ditampilkan karakteristik reponden berdasarkan tingkat pendidikan terakhirnya.



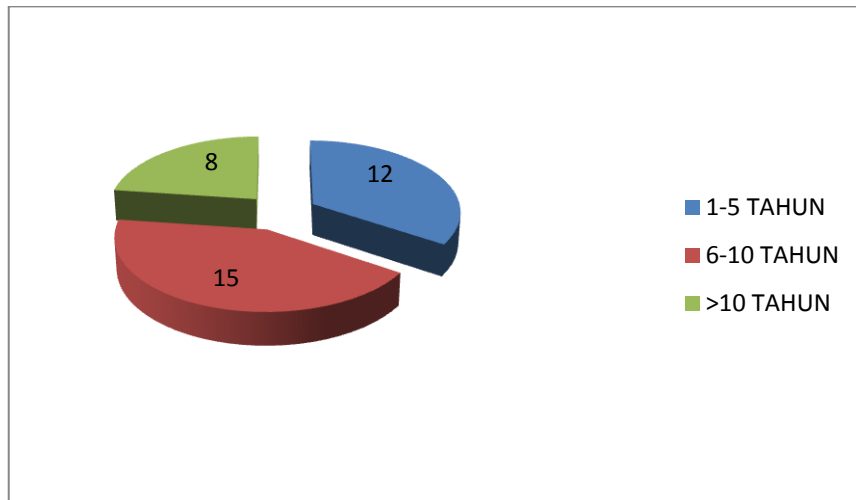
**Gambar 4.4**

**Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

Sumber: Hasil Olahan Data (2018)

Berdasarkan gambar 4.4 diperoleh informasi bahwa mayoritas pegawai memiliki pendidikan terakhir adalah S1 (Strata 1) yang berjumlah 24 orang, sedangkan pegawai yang memiliki pendidikan terakhir S2 berjumlah 8 orang, dan pegawai dengan tingkat pendidikan terakhir S3 berjumlah 3 orang. Adapun jumlah pegawai yang mayoritas lulusan S1 dilatar belakangi oleh kebutuhan dari Kantor BPKAD terhadap pegawai yang memiliki kemampuan *soft skill* dan *hard skill* yang sama. Selain itu peneliti juga menemukan bahwa alasan mengapa jumlah pegawai mayoritas lulusan S1 adalah karena tingkat kemampuan yang jauh lebih baik dibandingkan jenjang pendidikan dibawahnya (SMA dan Akademia) dan nilai gaji yang lebih rendah dibandingkan dengan jenjang pendidikan diatasnya (S2). Selanjutnya pada gambar berikut akan disajikan tentang lama bekerja dari responden penelitian.

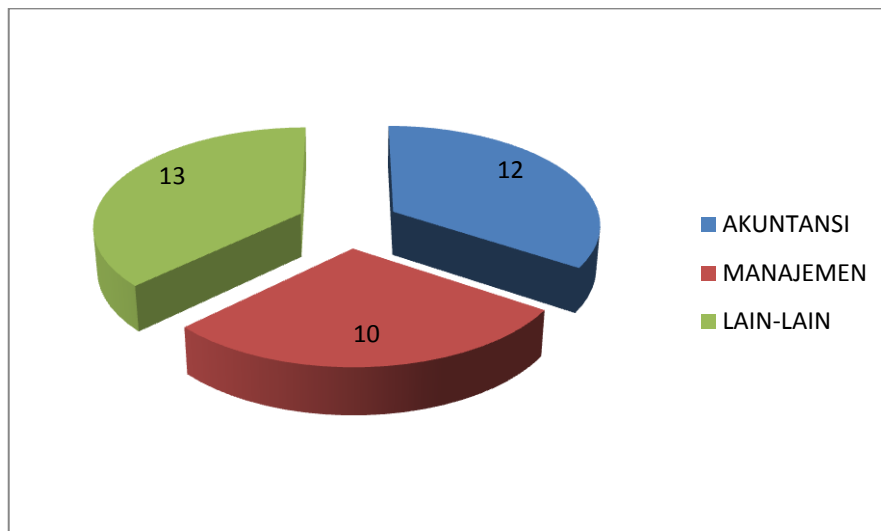




**Gambar 4.5**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja**

Sumber: Hasil Olahan Data (2018)

Berdasarkan Tabel dan gambar 4.5 dapat diperoleh informasi bahwa mayoritas responden penelitian ini telah bekerja selama 6-10 tahun berjumlah 15 orang, 1-5 tahun berjumlah 12 orang, dan >10 tahun berjumlah 8 orang. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa mayoritas pegawai atau responden penelitian ini tergolong pegawai yang loyal pada Kantor BPKAD Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya pada gambar berikutnya akan ditampilkan latar belakang pendidikan responden penelitian.



**Gambar 4.6**

**Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan**

Sumber: Hasil Olahan Data (2018)

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diperoleh hasil bahwa mayoritas responden penelitian ini memiliki latar belakang pendidikan yaitu akuntansi dan manajemen. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa perekrutan pegawai oleh BPKAD Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan *jobdesk* yang diberikan.

**C. Distribusi Jawaban Responden Penelitian**

**1. Pengelolaan Aset**

Gambaran umum Pengelolaan Aset terdapat enam indikator yaitu: Fungsional, Kepastian Hukum, Tansparansi, Efisiensi, Akuntabilitas, Kepastian Nilai.. Berdasarkan hasil pengolahan data yang bersumber dari responden, diperoleh gambaran Pengeloaan Aset Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Deskripsi Pengelolaan Aset**

Dimensi	Jawaban					Skor	Skor	Persentase
	5	4	3	2	1	Aktual	Ideal	
Fungsional	2	42	24	2	0	254	350	72.5%
Kepastian Hukum	2	36	28	4	0	246	350	70.2%
Transparansi	6	35	26	3	0	254	350	72.5%
Efisiensi	10	41	18	1	0	270	350	77.1%
Akuntabilitas	16	44	10	0	0	286	350	81.7%
Kepastian Nilai	3	18	37	11	1	221	350	63.1%
Total						1531	2100	72.9%

Sumber: Hasil Olahan Data (2018)

Berdasarkan hasil distribusi jawaban terhadap variabel pengelolaan aset provinsi Sumatera Utara diperoleh hasil bahwa indikator yang memiliki nilai terendah adalah indikator kepastian nilai. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa terdapat kekurangan yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Utara Khususnya BPKAD dalam menentukan dan merumuskan nilai suatu aset secara pasti dan akurat. Selain itu dapat diperoleh kesimpulan bahwa BPKAD masih relative kurang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam melaksanakan penilaian pada Aset milik Provinsi Sumatera Utara.

Hasil diatas juga menunjukkan terdapat kekurangan dari BPKAD dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan aset dengan tingkat kepastian hukum yang tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat masalah dalam pengelolaan aset daerah, dimana seharusnya dalam pengelolaan aset daerah harus memperhatikan aturan-aturan yang berlaku (hukum yang berlaku).

Berdasarkan hasil diatas juga ditemukan terdapat indikator pengelolaan aset yang memiliki tingkat atau persentase yang tinggi yaitu fungsional, transparansi, efisiensi dan akuntabilitas. Dimana hasil tersebut mengindikasikan bahwa secara keseluruhan BPKAD telah telah melaksanakan pengelolaan aset daerah secara baik dan tepat. Sehingga hasil ini selaras dengan pendapat dari Oktavia dan Sumini (2010) yang menyatakan pengelolaan aset milik daerah yang baik akan mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Tentu saja pengelolaan aset milik daerah harus dilakukan dengan baik dan benar.

## 2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Gambaran umum SAP terdapat empat indikator yaitu : Identifikasi prosedur, pihak-pihak terkait, dokumen terkait, dan jurnal standar.. Berdasarkan hasil pengolahan data yang bersumber dari responden, diperoleh gambaran SAPKD sebagai berikut :

**Tabel 4.2 Deskripsi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah**

Dimensi	Jawaban					Skor	Skor	Persentase
	5	4	3	2	1	Aktual	Ideal	
Identifikasi Prosedur	15	29	23	58	15	391	700	55.85714
Pihak-Pihak Terkait	3	31	57	47	2	409	700	58.42857
Dokumen Terkait	5	35	41	54	5	401	700	57.28571
Jurnal Standar	8	22	31	8	1	238	350	68
Total						1439	2450	72.9%

Sumber: Hasil Olahan Data (2018)

Berdasarkan hasil tabel 4.2 diatas diperoleh hasil bahwa indikator dari Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah yang paling rendah adalah indentifikasi prosedur. Dimana dalam tahapan penyusunan sistem akuntansi pemerintah daerah masih ditemukan kekurangan dimulai dari memahami proses bisnis pada pemerintah daerah khususnya terkait siklus pengelolaan keuangan daerah. Namun terdapat indikator dengan nilai persentase yang tinggi yaitu Jurnal standar. Dimana dalam alur pelaksanaan sistem akuntansi yang menjelaskan pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi, dokumen apa saja yang diperlukan, dan bagaimana pihak-pihak tersebut memperlakukan dokumen-dokumen yang terkait telah dirangkum secara baik.

Berdasarkan hasil penjelasan tersebut maka Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Masih harus menyesuaikan pelaksanaan SIAKD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

### **3. Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Gambaran umum Kualitas Keuangan Daerah terdapat empat indikator yaitu: Relevan, Andal, Dapat Dibandingkan, dan Dapat Dipahami. Berdasarkan hasil pengolahan data yang bersumber dari responden, diperoleh gambaran Kualitas Laporan Keuangan Daerah Adalah sebagai berikut sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Deskripsi Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Dimensi	Jawaban					Skor	Skor	Persentase
	5	4	3	2	1	Aktual	Ideal	
Relevan	3	19	29	45	9	277	525	52.7519
Andal	1	18	31	45	10	270	525	51.4285
Dapat Dibandingkan	4	19	29	43	10	279	525	53.1428
Dapat Dipahami	2	14	33	21	0	139	350	39.71429
Total						965	2450	72.9%

Sumber: Hasil Olahan Data (2018)

Berdasarkan tabel 4.3 diperoleh hasil bahwa indikator dengan persentase terendah adalah indikator dapat dipahami. Hasil ini mengindikasikan bahwa laporan keuangan daerah Provinsi Sumatera Utara masih dianggap kurang mampu dan sesuai dengan penggunaan aset dan pengelolaan keuangan yang terjadi. Selain itu berdasarkan hasil keseluruhan distribusi jawaban pada kualitas laporan keuangan daerah diperoleh informasi bahwa pelaksanaan kualitas laporan keuangan daerah Sumatera Utara masih relatif rendah. Sehingga dengan hasil ini Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara masih harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

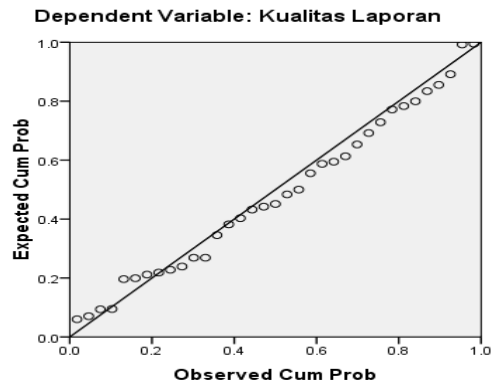
#### **D. Uji Asumsi Klasik**

##### **1. Uji Normalitas**

Tujuan uji normalitas adalah ingin menguji apakah dalam model regresi distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal, yakni distribusi data dengan bentuk lonceng. Salah satu cara untuk melihat normalitas adalah

dengan melihat grafik histogram dan grafik normal p-p plot, yang membandingkan antara dua observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Berikut ini adalah hasil pengujian normalitas p-p plot dan histogram.

**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**

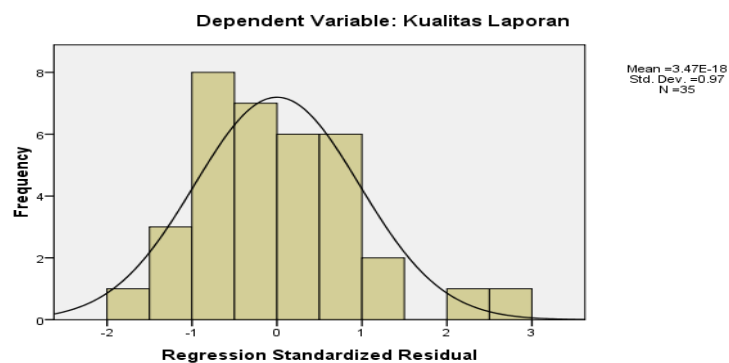


**Gambar 4.7**

### Hasil Pengujian Normalitas *P-P Plot* Persamaan X1 dan X2 Terhadap Y

Sumber: Hasil Olahan Data (2018)

**Histogram**



**Gambar 4.8**

### Hasil Pengujian Normalitas Histogram Persamaan X1 dan X2 Terhadap Y

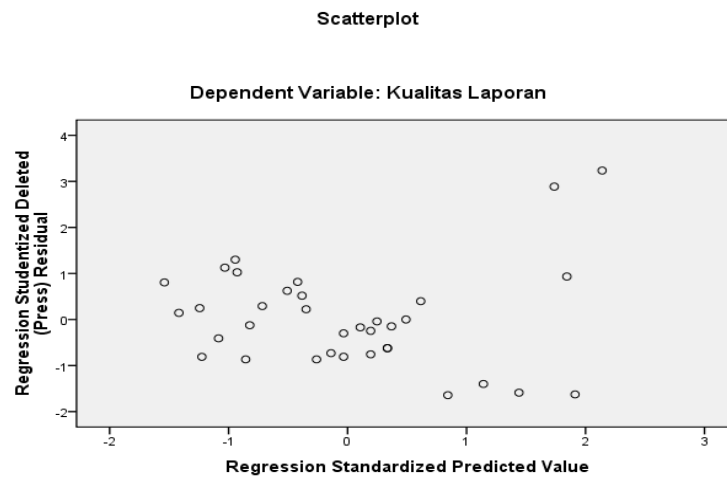
Sumber: Hasil Olahan Data (2018)

Berdasarkan pengujian normalitas P-P plot seluruh persamaan terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan cenderung mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data yang dipergunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas sehingga layak untuk diuji dengan model regresi. Selanjutnya berdasarkan pengujian grafik histogram dapat disimpulkan bahwa distribusi data normal karena grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas dan sebaliknya jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi data normal yang tidak melenceng kanan maupun melenceng kiri. Jadi, berarti data residual berdistribusi normal. Terbukti bahwa data maupun model yang digunakan memenuhi asumsi normalitas.

## **2. Uji Heterokedastisitas**

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.





**Gambar 4.9**

### **Hasil Pengujian Heterokedastisitas Persamaan X1 dan X2 Terhadap Y**

Sumber: Hasil Olahan Data (2018)

Berdasarkan Gambar pengujian heterokedastisitas terhadap 3 (tiga) persamaan maka dapat terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka berdasarkan metode grafik *scatter plot* tersebut maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

### **3. Uji Multikolenaritas**

Gejala multikolinieritas dapat dilihat dari besarnya nilai *Tolerance* dan *VIF (Variance Inflation Factor)*, Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya, *Tolerance* adalah mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan variabel independen lainnya. Nilai yang dipakai untuk *Tolerance*  $> 0,1$ , dan *VIF*  $< 10$ , maka tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 4.5 Hasil Pengujian Multikolenaritas

Nilai	Persamaan	
	X1 & X2 Terhadap Y	
<b>VIF</b>	1.006	1.006
<b>Tolerance</b>	0.994	0.994

Sumber: Hasil Olahan Data (2018)

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat terlihat bahwa data (variabel) tidak terkena multikolinieritas karena nilai VIF  $< 10$  dan nilai *Tolerance*  $> 0,1$  sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi Kualitas Laporan Keuangan Daerah berdasarkan masukan variabel Pengelolaan Aset Daerah dan SIAKD.

#### **E. Analisis Regresi Linear Berganda**

Dalam pengujian struktur ini, peneliti akan menguji pengaruh variabel Pengaruh Pengelolaan Aset (X1) dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah(Y) pada BPKAD. Berikut ini adalah hasil analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS.

Tabel 4.6 Data Pengaruh X1 dan X2 Terhadap Y

Coefficients<sup>a</sup>

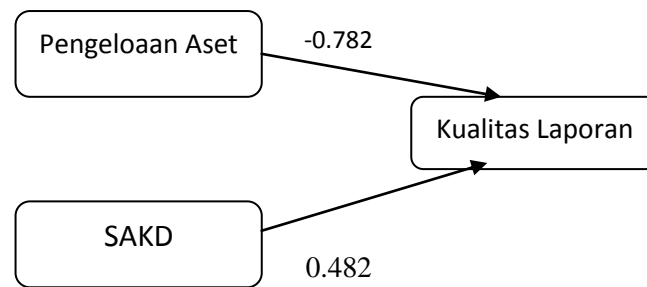
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
	1 (Constant)	42.203	10.848				3.891	.000		
Pengelolaan Aset	<b>-.782</b>	.249	-.417	3.141	.004	-.375	-.485	-.415	.994	1.006
Sistem Informasi Akuntansi	<b>.482</b>	.117	.549	4.136	.000	.517	.590	.547	.994	1.006

a. Dependent Variable:

Kualitas Laporan

Sumber: Hasil Olahan Data (2018)

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai koefisien dari dua variabel yaitu pengelolaan Aset (X1) adalah **-0.782** dan Sistem Akuntansi Keuangan (X2) adalah **0.482** karena. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa pengelolaan Aset (X1) memiliki pengaruh yang negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah sedangkan variabel SIA (X2) memberi pengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y). Jika digambarkan maka analisis jalur pada persamaan struktur adalah sebagai berikut:



**Gambar 4.10**

**Hasil Analisis Struktur**

Sumber: Hasil Olahan Data (2018)

**F. Pengujian Hipotesis**

**1. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji-F)**

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Kriteria pengujiannya adalah :

- a.  $H_0 : b_1 = 0$ , artinya secara serentak tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.
- b.  $H_0 : b_1 \neq 0$ , artinya secara serentak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Kriteria pengambilan keputusan adalah:

- a.  $H_0$  diterima jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$
- b.  $H_0$  ditolak jika  $F_{hitung} \geq F_{tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$

Untuk menentukan nilai  $F$ , maka diperlukan adanya derajat bebas pembilang dan derajat bebas penyebut, dengan rumus sebagai berikut:

- a.  $df$  (Pembilang) =  $k - 1$   
 b.  $df$  (Penyebut) =  $n - k$

Keterangan :

$n$  = jumlah sampel penelitian

$k$  = jumlah variabel bebas dan terikat

Pada penelitian ini diketahui jumlah sampel ( $n$ ) 35 dan jumlah keseluruhan variabel ( $k$ ) adalah 3, sehingga diperoleh :

- a.  $df$  (pembilang) =  $3 - 1 = 2$   
 b.  $df$  (penyebut) =  $35 - 3 = 32$  (3.29)

Nilai  $F$ -hitung akan diperoleh dengan menggunakan bantuan SPSS, kemudian akan dibandingkan dengan  $F$ -tabel pada tingkat  $\alpha = 5\%$ .

**Tabel 4.7 Hasil Pengujian Signifikansi Simultan**

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	401.249	2	200.625	<b>12.581</b>	<b>.000<sup>a</sup></b>
	Residual	510.294	32	15.947		
	Total	911.543	34			

a. Predictors: (Constant), Sistem Akuntansi Keuangan, Pengelolaan Aset

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan

Sumber: Hasil Olahan Data (2018)

Pada Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa hasil perolehan F-hitung pada kolom F yakni sebesar 12.581 dengan tingkat signifikansi = 0.000, lebih besar dari nilai F-tabel yakni 3.29, dengan tingkat kesalahan  $\alpha = 5\%$  atau 0.05, atau dengan kata lain  $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$  ( $12.581 > 3.29$ ). Berdasarkan kriteria pengujian hipotesis jika  $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$  dan tingkat signifikansinya ( $0.000 < 0.05$ ), menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas (Pengelolaan Aset (X1) dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2)) secara serempak adalah signifikan terhadap variabel terikat (Kualitas Laporan Keuangan Daerah).

## 2. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji-T)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh suatu variabel bebas secara parsial (individual) terhadap variasi variabel terikat. Kriteria pengujiannya adalah :

- a.  $H_0 : b_1 = 0$ , artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.
- b.  $H_0 : b_1 \neq 0$ , artinya secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Kriteria pengambilan keputusan adalah:

- a.  $H_0$  diterima jika  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$
- b.  $H_0$  ditolak jika  $t \text{ hitung} \geq t \text{ tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$

Hasil pengujian adalah :

- a. Tingkat kesalahan ( $\alpha$ ) = 5% dan derajat kebebasan (df) = (n-k)
- b. n = jumlah sampel, n = 35
- c. k = jumlah variabel yang digunakan, k = 3

d. Derajat kebebasan/ *degree of freedom*(df)  $= (n-k) = 35 - 3 = 32$

Uji-t yang dilakukan adalah uji satu arah, maka ttabel yang digunakan adalah  $t_{0,05} (32) = 1.69389$ . Berikut ini adalah hasil pengujian T-hitung menggunakan alat analisis SPSS.

**Tabel 4.8 Hasil Pengujian Signifikansi Parsial Sub**

T	Sig.
-3.141	.004
4.136	.000

Sumber: Hasil Olahan Data (2018)

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa:

a. Variabel Pengelolaan Aset (X1)

Nilai t-hitung variabel Pengelolaan Aset adalah 3.141 dan nilai t-tabel 1.69 maka  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3.141 > 1.69$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pengelolaan Aset berpengaruh negatif dan signifikan ( $0.004 < 0,05$ ) secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

b. Variabel Sistem Akuntansi Keuangan (X2)

Nilai t-hitung variabel Sistem Akuntansi Keuangan adalah 4.136 dan nilai t-tabel 1.69 maka  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $4.136 > 1.69$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan ( $0,00 < 0,05$ ) secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

### 3. Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur proporsi atau persentase kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat. Koefisien determinasi berkisar antara nol sampai satu ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Jika  $R^2$  semakin besar (mendekati satu), maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas (X) adalah besar terhadap variabel terikat (Y).

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.663 <sup>a</sup>	.440	.405

a. Predictors: (Constant), Sistem Akuntansi Keuangan, Pengelolaan Aset

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS (2018)

Berdasarkan Tabel 4.13 dapat dilihat bahwa :

- a.  $R = 0.663$  berarti hubungan Pengelolaan Aset (X1) dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) dengan kualitas laporan keuangan daerah sebesar 66.3% (cukup tinggi).
- b. Nilai *Adjusted R Square* = 0.404, hal tersebut menunjukkan bahwa Pengelolaan Aset (X1) dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) terhadap kualitas laporan keuangan daerah adalah sebesar 40.5% Sedangkan 59.5% adalah pengaruh variabel lain diluar penelitian ini



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis maka dapat dirumuskan kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil distribusi jawaban diperoleh bahwa Pengelolaan Aset Daerah masih ditemukan kekurangan yaitu dalam aspek kepastian nilai aset. Sedangkan berdasarkan hasil pengujian signifikansi parsial (uji-t) diperoleh hasil bahwa variabel pengelolaan Aset Daerah memiliki pengaruh yang negative dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
2. Berdasarkan hasil distribusi jawaban diperoleh bahwa Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah masih ditemukan kekurangan yaitu dalam aspek identifikasi prosedur. Sedangkan berdasarkan hasil pengujian signifikansi parsial (uji-t) diperoleh hasil bahwa variabel Sistem Akuntansi Keuangan Keuangan Daerah memiliki pengaruh yang Positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
3. Berdasarkan hasil pengujian signifikansi simultan ditemukan bahwa variabel bebas (Pengelolaan Aset (X1) dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2)) secara serempak dan signifikan berpengaruh terhadap variabel terikat (Kualitas Laporan Keuangan Daerah).

## **B. Saran Penelitian**

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam penegelolaan aset daerah diharapkan dalam sistem penghapusan Aset/Barang Milik Negara/Daerah harus meminta persetujuan dari DPRD sebelum membuat berita acara.
2. Dalam pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah maka BPKAD harus secara teliti dalam melaksanakan indentifikasi prosedur agar hasil laporan dapat lebih berkualitas
3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk memilih alternative variabel lain untuk mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah seperti kualitas dan kemampuan auditor pemerintah, agar dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih kompleks.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Erlina, 2011. *Metodologi Penelitian*. USU Press, Medan.
- Ghozali, Imam, 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 19*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Istijanto,. 2005,*Riset Sumber Daya Manusia*, Jakarta : PTGramedia Pustaka Utama.
- Juliandi, Azuar.2013. “*Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Bisnis*”. Medan: M2000.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. UII Press Yogyakarta.
- Muller, *et al.* 2016. *IPSAS Explained. Second Edition*. United Kingdom : John Wiley and Sons, Ltd.
- Oktavia Pangaribuan dan Sumini. 2010. Modul: *Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- Rasdianto. 2013. *Akuntansi Keuangan Berbasis Akrual*. Penerbit: Salemba Empat.
- Sholeh ,Chabib. dan Romansjah, Heru. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung. Fokusmedia.
- Sugiyono. 2012. “*Metode Penelitian Bisnis*”. Bandung : CV. Alfabeta, Bandung.
- Wilson, *et al.* 2016. *Accounting for Governmental and NonProfit Entities. Fifteenth Edition*. New York : McGraw-Hill Companies.

### Sumber UU, Peraturan Pemerintah,dll:

- Republik Indonesia. 2003.Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Republik Indonesia. 2004. Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Republik Indonesia. 2004. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. 2005.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah. Jakarta.

Republik Indonesia. 2008. PP No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern

Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah

Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Sekretariat Negara RI. Jakarta.

#### **Sumber Jurnal & Skripsi:**

Ferdianus, 2013. *Analisis penatausahaan aset tetap untuk menghasilkan data yang dipercaya dalam laporan barang milik daerah (studi pada pemerintah provinsi maluku)*. Tesis. Universitas Gajah Mada.

Hidayati, et al. 2016. *Pengaruh siklus pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan \*(studi empiris pada pemerintah kabupaten solok selatan)*. Jurnal Akuntansi vol 8, No.1

Permadi. 2013. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi. Bandung : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

Poae, et.al. 2017. *Pengaruh Pengelolaan Barang milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud*. Jurnal Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi.

Rizqi. 2017. *Pengaruh Pengelolaan Aset Daerah (Psap 07 Aset Tetap) Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bandung)*. Universitas Komputer Indonesia

Sari, Deti Mawar. 2016. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi. Bandung : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

**Sumber Internet:**

<http://www.bpk.go.id>, diakses 15 April 2018.

<http://medan.bpk.go.id> diakses 15 April 2018.

<http://medan.tribunnews.com>, diakses 15 April 2018

**Variables Entered/Removed<sup>b</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Sistem Informasi Akuntansi, Pengelolaan Aset <sup>a</sup>		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.663 <sup>a</sup>	.440	.405	3.99333	.440	12.581	2	32	.000	1.241

a. Predictors: (Constant), Sistem Informasi Akuntansi, Pengelolaan Aset

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan

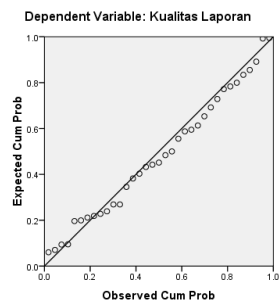
**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	401.249	2	200.625	12.581	.000 <sup>a</sup>
	Residual	510.294	32	15.947		
	Total	911.543	34			

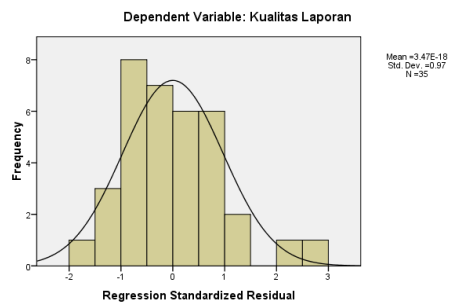
a. Predictors: (Constant), Sistem Informasi Akuntansi, Pengelolaan Aset

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Histogram

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	42.203	10.848		3.891	.000					
	Pengelolaan Aset	-.782	.249	-.417	-3.141	.004	-.375	-.485	-.415	.994	1.006
	Sistem Informasi Akuntansi	.482	.117	.549	4.136	.000	.517	.590	.547	.994	1.006

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan

Collinearity Diagnostics<sup>a</sup>

Model	Dimensi on	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	Pengelolaan Aset	Sistem Informasi Akuntansi
1	1	2.984	1.000	.00	.00	.00
	2	.013	14.872	.04	.07	.96
	3	.002	37.010	.96	.93	.04

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan

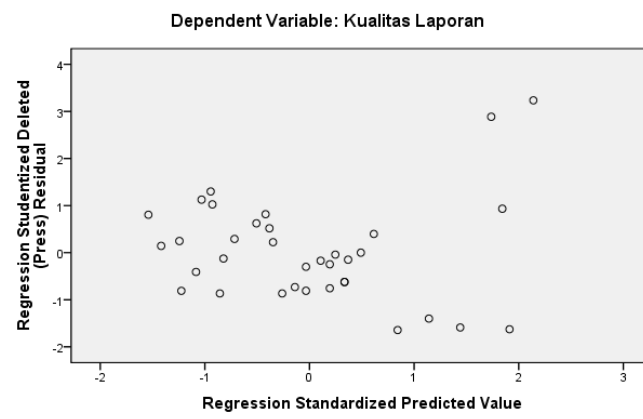
Residuals Statistics<sup>a</sup>

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	25.0242	37.6641	30.3143	3.43532	35
Std. Predicted Value	-1.540	2.139	.000	1.000	35
Standard Error of Predicted Value	.686	2.107	1.113	.364	35
Adjusted Predicted Value	24.4853	37.8197	30.2642	3.47099	35
Residual	-6.20834	10.33594	.00000	3.87410	35
Std. Residual	-1.555	2.588	.000	.970	35
Stud. Residual	-1.601	2.842	.006	1.038	35
Deleted Residual	-7.29429	12.46288	.05009	4.44299	35
Stud. Deleted Residual	-1.643	3.235	.023	1.097	35
Mahal. Distance	.031	8.496	1.943	2.001	35
Cook's Distance	.000	.554	.052	.115	35
Centered Leverage Value	.001	.250	.057	.059	35

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan



## Scatterplot



## KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth : Bapak/Ibu Responden

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka memenuhi Tugas Akhir Skripsi Program Studi S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini dibuat untuk meneliti "**Pengaruh Pengeloan Aset Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara**". Informasi Bapak/Ibu sangat berguna bagi penelitian ini, karena Bapak/Ibu adalah orang yang tepat untuk mengutarakan pengalaman dan pendapat mengenai hal ini. Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab pertanyaan dengan jujur dan benar. Sesuai dengan kode etik penelitian, jawaban Bapak/Ibu akan saya jaga kerahasiaannya. Keberhasilan penelitian ini sangat tergantung pada partisipasi Bapak/Ibu. Atas dukungan dan partisipasinya saya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

## LEMBAR KUESIONER

### Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Mohon Memberi Tanda Silang (X) Pada jawaban yang bapak/ibu anggap paling sesuai
2. Setiap Pernyataan hanya membutuhkan 1 (satu) jawaban saja
3. Setelah melakukan Pengisian, mohon bapak/ibu memberikannya kepada yang menyerahkan kuisisioner ini pertamakali

### A. IDENTITAS RESPONDEN

Mohon kesediaan Bapak/Ibu mengisi daftar berikut :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
  - a. Pria
  - b. Wanita
3. Umur :
4. Pendidikan Terakhir :
  - a. SMA
  - b. D3
  - c. S1
  - d. S2
  - e. S3
5. Latar Belakang Pendidikan :
  - a. Akutansi

b. Manajemen

c. Lainnya...

6. Lama Bekerja :

a. 1-5 Tahun

b. 5-10 Tahun

c. > 10 Tahun

**PETUNJUK PENGISIAN :**

Di bawah ini terdapat sejumlah pernyataan. Baca dan pahami setiap pernyataan dengan seksama, kemudian berikan respon saudara dengan cara memberikan tanda silang (X) atau conteng (√) pada kolom yang telah tersedia dengan satu pilihan jawaban.

Keterangan :

**SS** = Sangat Setuju

**S** = Setuju

**KS** = Kurang Setuju

**TS** = Tidak Setuju

**STS** = Sangat Tidak Setuju

**1. Pengelolaan Aset Daerah (X1)**

No	Keterangan	SS	S	KS	TS	STS
1	Pengguna Barang dan Bagian Administrasi Barang Daerah memahami struktur organisasi dari masing-masing SKPD sehingga tugas pokok dan fungsinya diketahui dengan jelas agar perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilakukan dengan menganalisa kebutuhan organisasi dan kebutuhan pegawai					

2	Pengguna Barang dan Bagian Administrasi Barang Daerah menetapkan kebutuhan barang sesuai dengan keperluan, mutu dan jumlah					
3.	Terhadap barang milik daerah yang berlebih pada suatu SKPD dilakukan pemanfaatan berupa hibah atau dipindahtangankan kepada SKPD lain dengan mendapat persetujuan dari Pengelola Barang					
4	Bagian Administrasi Barang Daerah membantu Pengelola membuat pedoman dan SKPD memahami mengenai:1. Kebijakan pengelolaan BMD, 2. Standarisasi sarana dan prasarana kerja, standarisasi satuan harga,					
5	Bagian Administrasi Barang Daerah membantu Pengelola membuat petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan dan penyimpanan, dan penyaluran barang milik daerah					
6	Bagian Administrasi Barang Daerah membantu Pengelola membuat petunjuk teknis pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah dan pelaksanaan					

	sensus barang milik daerah setiap 5 tahun sekali					
7	Bagian Administrasi Barang Daerah membantu Pengelola membuat petunjuk teknis penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah.					
8	Penilaian Barang Milik Daerah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah dan dilakukan dalam rangka pengamanan dan penyusunan neraca pemda dan Bagian Administrasi Barang Daerah membuat surat keputusan Kepala Daerah untuk pembentukan tim penilai Barang Milik Daerah dan dapat melibatkan lembaga independen bersertifikat dibidang penilaian aset					
9	Bagian Administrasi Barang Daerah melakukan pemberian tanda status kepemilikan barang milik daerah.					
10	Bagian Administrasi Barang Daerah telah membuat database barang milik daerah					
11	Bagian Administrasi Barang Daerah secara berkala melakukan					

	pembinaan pengelolaan barang milik daerah dan melakukan pengawasan pelaksanaan tugas kepada subbagian umum, pengurus barang dan penyimpan barang pada masing-masing SKPD					
12	Bagian Administrasi Barang Daerah sebagai pembantu pengelola merekapitulasi hasil laporan hasil pemeriksaan barang pada masing-masing SKPD dan dikirimkan ke pengelola dengan tembusan kepada Inspektorat					

## 2. Sistem Akuntansi Daerah

No	Keterangan	SS	S	KS	TS	STS
1	Penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua					
2	Standar akuntansi pelaporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan konsolidasi					
3.	Standar akuntansi penyusunan laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan konsolidasi telah mencakup seluruh realisasi pendapatan, belanja, transfer dan					

	pembiayaan					
4	Laporan keuangan SKPD sebagai entitas akuntansi ditetapkan sebanyak 3 laporan, neraca dan Catatan Laporan keuangan PPKD					
5	Laporan keuangan gabungan (konsolidasi) yang merupakan laporan keuangan pemerintah daerah ditetapkan 5 laporan, neraca dan catatan atas laporan keuangan.					
6	Pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran telah bebas dari kesalahan pembebanannya pada rekening bersangkutan					
7	Pencantuman nilai aset telah didasarkan pada harga perolehan dan didukung bukti-bukti yang lengkap dan sah					
8	Pencatatan nilai piutang telah dilakukan berdasarkan penilaian kualitas piutang sesuai kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang telah ditetapkan					
9	Perbandingan jumlah belanja modal wajib sama dengan nilai aset yang bertambah pada tahun berkenaan					
10	Aset yang fisiknya telah rusak berat atau fisiknya tidak					



	ditemukan telah dilakukan pencatatannya pada daftar khusus aset lain-lain					
11	Nilai asset pada laporan keuangan telah disajikan adanya nilai penyusutan dan penyusutannya telah sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berkembang					
12	Aset tetap yang nilainya telah nol pada umumnya telah dilakukan penghapus bukuan dan telah dilakukan pelelangan untuk aset yang masih mempunyai nilai manfaat					
13	Laporan keuangan SKPD dan laporan Pemerintah Daerah telah direview oleh Inspektorat Kabupaten sebelum disampaikan kepada BPK RI					
14	Penyusunan laporan keuangan telah diselesaikan tepat waktu yaitu paling lambat tanggal 31 Desember					

### 3. Kualitas Laporan Daerah

No	Keterangan	SS	S	KS	TS	STS
1	Laporan keuangan yang disajikan dapat membantu mengevaluasi atau dapat dihubungkan dengan					

	maksud penggunaannya					
2	Laporan keuangan memiliki manfaat atau umpan balik atau memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan mengoreksi ekspektasinya di masa lalu					
3.	Laporan keuangan memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang					
4	Laporan keuangan telah disusun atau disajikan tepat waktu sehingga dapat berguna untuk pembuatan keputusan pimpinan					
5	Laporan keuangan memuat informasi yang selengkap mungkin dan telah mencakup seluruh informasi akuntansi					
6	Transaksi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material					
7	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan memuat informasi yang jujur dan wajar disajikan					
8	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan memuat					

	informasi yang dapat diuji					
9	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak berpihak kepada kebutuhan tertentu					
10	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya untuk kebijakan akuntansi yang sama					
11	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat difahami oleh pengguna laporan keuangan					

Distribusi Jawaban Responden Variabel Pengelolaan Aset Daerah

No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X1.11	X1.12	TOTAL
1	3	3	3	3	3	4	3	3	1	2	4	4	36
2	4	4	2	4	5	4	3	3	1	2	3	4	39
3	4	3	4	3	3	4	4	4	3	2	3	4	41
4	3	3	3	4	4	3	4	3	4	3	2	3	39
5	3	3	3	3	4	3	4	5	3	2	2	3	38
6	4	4	3	4	4	3	4	5	3	3	3	3	43
7	3	4	3	3	3	4	5	4	2	2	2	4	39
8	3	4	3	4	4	3	4	4	2	2	3	3	39
9	3	4	4	3	4	5	4	4	2	2	4	5	44
10	4	4	5	5	4	2	4	4	2	2	2	2	40
11	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	44
12	4	4	2	3	4	3	4	4	2	2	3	3	38
13	4	4	4	4	4	3	4	5	1	1	3	3	40
14	4	4	4	4	4	3	4	5	3	3	2	3	43
15	4	4	4	5	5	4	4	4	2	2	4	4	46
16	4	4	4	4	3	4	4	4	2	1	3	4	41
17	4	4	4	5	5	4	4	5	1	1	4	4	45
18	5	4	2	4	4	1	4	5	2	2	3	1	37
19	4	3	3	4	3	3	4	5	1	1	3	3	37
20	4	4	4	4	4	2	5	4	2	2	2	2	39
21	4	4	4	4	4	3	4	4	1	1	3	3	39
22	3	3	3	4	5	3	5	5	1	1	3	3	39
23	4	4	4	4	4	3	4	4	3	2	3	3	42
24	4	4	3	5	4	3	5	4	2	1	3	3	41
25	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	44
26	4	4	3	3	3	5	4	4	2	1	3	5	41
27	4	3	3	4	4	5	4	3	3	1	4	5	43
28	4	3	4	3	4	3	4	4	2	2	2	3	38
29	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3	3	4	41
30	4	4	3	4	4	4	5	5	1	2	4	4	44
31	3	3	4	4	4	4	4	4	1	2	3	4	40
32	2	2	3	3	2	4	3	3	3	2	3	4	34

33	3	5	3	3	3	3	4	4	4	3	2	3	40
34	4	3	3	4	5	3	4	3	3	2	2	3	39
35	3	3	4	5	4	3	5	5	3	3	3	3	44

Distribusi Jawaban Responden Variabel Sistem Akuntansi Keuangan

No	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	X2.11	X2.12	X2.13	X2.14	Total
1	4	4	2	2	3	4	3	3	4	3	4	4	5	4	49
2	4	4	2	2	4	4	2	4	4	2	4	5	5	5	51
3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	55
4	5	2	2	2	3	4	2	3	4	2	2	4	5	3	43
5	4	3	2	2	3	4	2	3	4	2	2	3	4	5	43
6	5	2	3	3	2	3	2	2	3	2	2	2	4	4	39
7	5	4	2	2	2	3	2	2	3	2	2	4	3	4	40
8	5	2	3	2	3	3	2	3	3	2	2	2	4	4	40
9	5	4	1	2	2	4	2	2	4	2	5	3	4	4	44
10	4	3	2	2	3	3	2	3	3	2	2	4	3	4	40
11	5	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	3	3	4	57
12	5	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	4	2	3	36
13	4	3	2	2	4	3	3	4	3	3	2	4	2	3	42
14	5	2	1	1	3	3	2	3	3	2	1	3	3	3	35
15	5	1	2	2	3	3	2	3	3	2	4	3	2	4	39
16	5	1	1	2	2	3	2	2	3	2	2	2	3	3	33
17	4	1	1	2	4	4	2	4	4	2	2	2	4	5	41
18	4	2	3	2	3	4	2	3	4	2	2	3	2	2	38
19	4	2	4	3	4	4	4	4	4	4	3	2	4	3	49
20	4	3	3	2	3	1	2	3	1	2	2	3	3	3	35
21	4	2	3	3	3	3	2	3	3	2	3	4	3	3	41
22	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	32
23	5	2	2	2	3	3	2	3	3	2	2	4	4	4	41
24	5	2	2	2	3	3	2	3	3	2	3	3	3	4	40
25	3	2	2	2	3	3	2	3	3	2	2	3	4	4	38
26	4	2	3	3	3	3	2	3	3	2	2	2	3	1	36
27	4	3	2	2	3	3	2	3	3	2	3	4	3	3	40
28	4	2	1	1	3	5	1	3	5	1	1	3	2	2	34
29	4	3	3	3	4	5	3	4	5	3	3	4	3	3	50
30	5	4	2	2	2	3	2	2	3	2	4	3	3	3	40
31	4	2	2	1	3	4	3	3	4	3	2	3	3	3	40
32	3	3	1	1	2	4	2	2	4	2	2	2	3	3	34

33	4	2	2	2	3	4	2	3	4	2	4	3	3	3	41
34	5	2	1	1	3	4	2	3	4	2	3	3	3	5	41
35	4	2	2	2	2	4	2	2	4	2	1	3	4	5	39

Distribusi Jawaban Responden Variabel Kualitas Laporan Keuangan

No	y.1	y.2	y.3	y.4	y.5	y.6	y.7	y.8	y.9	y.10	y.11	Total
1	4	5	5	5	4	3	4	5	4	4	5	48
2	4	4	5	4	4	3	5	5	4	5	3	46
3	3	4	4	5	2	4	3	4	3	4	4	40
4	2	4	3	4	2	2	2	5	4	4	2	34
5	2	2	2	4	2	2	2	2	4	3	2	27
6	2	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	24
7	2	2	3	4	4	3	2	2	2	2	2	28
8	4	3	2	4	2	2	3	2	2	3	3	30
9	2	2	3	4	2	3	4	4	3	2	2	31
10	2	3	4	3	2	2	2	2	2	3	2	27
11	2	2	2	4	2	2	4	2	3	4	3	30
12	2	2	4	3	2	3	3	2	2	2	2	27
13	2	3	3	5	2	2	3	2	2	4	3	31
14	2	2	3	1	2	2	2	2	3	3	4	26
15	2	2	2	4	2	3	4	2	2	3	2	28
16	2	3	4	3	1	1	3	2	2	2	4	27
17	1	1	3	4	3	3	4	2	3	4	3	31
18	3	3	4	4	2	4	3	1	1	3	3	31
19	2	4	3	2	3	2	3	3	3	4	2	31
20	3	2	3	4	2	2	2	2	4	3	4	31
21	2	2	2	3	2	4	3	3	2	3	3	29
22	2	4	3	4	2	3	3	2	2	2	4	31
23	2	3	3	4	2	1	3	2	4	3	3	30
24	2	1	3	4	1	1	3	2	3	3	3	26
25	1	1	3	5	1	1	3	2	1	3	2	23
26	1	1	3	4	3	4	3	1	1	3	3	27
27	3	4	3	4	1	2	4	1	1	3	3	29
28	1	2	4	2	4	4	2	3	4	3	3	32
29	4	4	2	1	1	4	3	1	2	4	3	29
30	1	4	3	4	3	2	2	4	4	2	3	32
31	3	2	2	4	2	2	3	1	4	3	3	29
32	2	2	3	4	3	4	3	3	2	2	4	32



33	3	4	3	5	2	2	2	2	2	3	2	30
34	2	2	2	4	2	2	2	3	4	3	3	29
35	2	2	2	3	3	4	1	2	2	2	2	25

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

Medan: 16/11/2017 H M

Kepada Yth,  
Ketua Jurusan  
Fakultas Ekonomi UMSU  
Di  
Medan



Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nastasya Dian Prahasti  
NPM : 1409170405  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan  
Kelas/Semester : C (Siang) / VII

Merencanakan pengajuan judul untuk pembuatan SKRIPSI yaitu :

1. Analisis Kualitas Pelayanan PT. Jasa Raharga dengan metode SERVQUAL
2. Analisis Penentuan harga pokok produksi dalam Menetapkan harga jual air minum dalam Kemasan pada PDAM Tirtanadi Medan.

Berdasarkan hasil pertemuan dengan program studi maka ditetapkan calon pembimbing yaitu:

Nama Pembimbing: Dr. Arpan Ikhwan SE, M. S. 30/11/2017 B.

Dari hasil survey & kunjungan ke perusahaan/tempat penelitian serta proses pembimbing dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Pengelolaan Asef Daerah Provinsi Sumatera Utara masih dianggap belum Maksimal sehingga Peningkatan jumlah Asef kurang maksimal
2. Terjadinya ketidak selarasan penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
3. Hasil laporan keuangan daerah Provinsi Sumatera Utara masih memiliki keturungan dalam beberapa aspek.

Dengan demikian judul yang disetujui bersama dosen pembimbing adalah:

Pengaruh Pengelolaan Asef Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Nomor Agenda : 312

Ketua/ Sekretaris Jurusan

(Fitriani Saragih SE, M. Si)

Pemohon

(Nastasya Dian Prahasti)

atatan:

1. Proposal Penelitian harus diAgendakan paling lama 1 (Satu) bulan setelah di Paraf oleh program studi
2. Seminar Proposal Paling lama 1 (Satu) bulan setelah judul di Agendakan.

Dikethuai Oleh  
Pembimbing

(Dr. Arpan Ikhwan SE, M. Si)



**PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Medan, 04 Juli H  
.....2018M

Kepada Yth.  
Ketua Sekretaris Program Studi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU  
di  
Medan

.....

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : N A S T A S Y A D I A N P R A H A S K I

NPM : 1 4 0 5 1 7 0 4 8 5

Tempat, Tgl. Lahir : D O L O K M A N A M P A N 0 0 4 -  
A P R I L 1 9 9 6

Program Studi : Akuntansi /  
Manajemen

Alamat Mahasiswa : P A S A R I I I K R A K A T A U  
G G . D E L I M U R A N M E D A N

Tempat Penelitian : K A N T O P B A D A N K E S A T U A  
N B A N O S A D A N P O L I T I K  
P R O V I N S I S U M A T E R A U T A R A

Alamat Penelitian : J I G A T O T S U B R O T O N O .  
3 6 1 S E I S I K A M B I N G D  
M e d a n P e t i s a h

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

- 1. Transkrip nilai sementara
- 2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui  
Ketua Sekretaris Program Studi

*Julia*  
Zula Hanum SE, M.Si.

Wassalam  
Pemohon

*N*  
(Nastasya Dian Rahasi)





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Cerdas & Terpercaya

Jawab surat ini agar disebutkan tanggalnya

Nomor : 2750/II.3-AU/UMSU-05/ F / 2018  
Lampiran : -  
Perihal : IZIN RISET

Medan, 30 Rajab 1439 H  
16 April 2018 M

Kepada :  
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK MEDAN**  
Jln. Jend. Gatot Subroto No. 361 Medan  
Di.-  
Tempat.

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : NASTASYA DIAN PRAHASKI  
NPM : 1405170485  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikaum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan ✓  
  
H. JANTARI, SE, MM, M.Si.

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Pertinggal.



# BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Gatot Subroto Nomor 361 Telepon 4524894 – 4557009 – 4527480

Fax. (061)4153148 Medan 20119

## REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 - 1652 /BKB-P

- Isar : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- b. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Organisasi Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan politik Provinsi Sumatera Utara
- Penimbang : Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 3009/II.3-AU/UMSU-05/F/2018 tanggal 04 Juli 2018 tentang Rekomendasi Penelitian.

## MEMBERITAHUKAN BAHWA

- a. Nama : Nastasya Dian Prahaski
- b. Alamat : Medan
- c. Pekerjaan : Mahasiswa
- d. Nip/Nim/KTP : 1405170485
- e. Judul : Pengaruh Pengelolaan Aset Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- f. Lokasi/Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- g. Lamanya : 3 (tiga) bulan
- h. Peserta : Sendiri
- i. Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Sehubungan dengan kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan Survey/ Riset/ Penelitian/ KKN dimaksud dengan ketentuan :

1. Menghormati dan mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di Wilayah riset / penelitian.
2. Tidak dibenarkan melakukan riset / penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset / penelitian.
3. Menyerahkan hasil riset / penelitian kepada Gubernur Sumatera Utara Cq Badan Kesbangpol Provinsi.
4. Rekomendasi riset / penelitian ini dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.
- Demikian Rekomendasi Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan 12 Juli 2018

An. KEPALA BADAN KESBANGPOL PROVINSI SUMATERA UTARA  
KABID PENANGKALAN KONFLIK DAN  
KEBERSIHAN NASIONAL



ibusan  
ipak Gubernur Sumatera Utara (sebagai Laporan)  
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu  
Balitbang Provsu  
kultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
rtinggal







**PENGESAHAN PROPOSAL**

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Senin, 23 Juli 2018 menerangkan bahwa:

Nama : NASTASYA DIAN PRAHASKI  
N.P.M. : 1405170485  
Tempat / Tgl.Lahir : DOLOK MARAMAPNG,04-04-1996  
Alamat Rumah : JL.PASAR III KRAKATAU

JudulProposal : PENGARUH PENGELOLAAN ASET DAERAH DAN SISTEM AKUNTANI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Dr. Arfan Ikhsan SE, M.Si 14/8-2018*

Medan, 23 Juli 2018

**TIM SEMINAR**

Ketua

**FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si**

Pembimbing

**DR.ARFAN IKHSAN, SE, M.Si**

Sekretaris

**ZULIA HANUM, SE, M.Si**

Pembanding

**ZULIA HANUM, SE, M.Si**

Diketahui / Disetujui  
An. Dekan  
Wakil Dekan I

**ADE GUNAWAN, SE, M.Si**





Integritas, Cerdas & Terpercaya

Jawab surat ini agar disebutkan  
an tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 3644/II.3-AU/UMSU-05/F/2018  
Lamp. : -  
Hal : MENYELESAIKAN RISET

Medan, 04 Muharram 1440 H  
14 September 2018 M

Kepada :

Yth, Bapak / Ibu Pimpinan  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVSU**  
di  
Tempat.

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpinan, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : NASTASYA DIAN PRAHASKI  
N P M : 1405170485  
Semester : IX (Sembilan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : PENGARUH PENGELOLAAN ASET DAERAH DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan ✓







PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan P. Diponegoro Nomor 30 - Telepon 4156000

**MEDAN**

Medan, 23 Juli 2018

Nomor : 071/1431/Seker  
Lampiran :  
Perihal : Telah Selesai Penelitian.

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera  
Utara.

di -  
Medan

Dengan Hormat,

Schubungan dengan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 070-1652/BKB-P tanggal 12 Juli 2018, Perihal Rekomendasi Penelitian dan Surat Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 3009/II.3-AU/UMSU-05/F/2018 tanggal 04 Juli 2018, tentang Rekomendasi Penelitian atas nama :

Nama : Nastasya Dian Prahaski  
NIM : 1405170485  
Judul : Pengaruh Pengelolaan Aset Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Aset Daerah Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

Dengan ini kami menyatakan bahwasanya Mahasiswi tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Demikian kami sampaikan untuk urusan selanjutnya.

**a.n. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH PROVSU  
SEKRETARIS,**



**H. RAJA INDRA SALEH, SH  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19650624 198602 1 001**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Ingat, Cerdas & Terpercaya

Menjawab surat ini agar disebutkan  
dan tanggalnya

**PENETAPAN PROYEK PROPOSAL  
MAKALAH / SKRIPSI MAHASISWA  
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

**NOMOR 3645 / TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2018**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan,  
berdasarkan Surat Persetujuan Ketua Jurusan AKUNTANSI, Tanggal **23 JULI 2018** Menetapkan  
Risalah Makalah / Skripsi :

Nama : NASTASYA DIAN PRAHASKI  
N P M : 1405170485  
Semester : IX (Sembilan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : PENGARUH PENGELOLAAN ASET DAERAH DAN SISTEM AKUNTANSI  
KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH  
Pembimbing : **Dr. ARFAN IKHSAN, SE, M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Risalah / Makalah / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Risalah / Makalah / Skripsi dengan ketentuan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara – Medan.
2. **Proyek Proposal / Skripsi** dan tulisan dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **14 SEPTEMBER 2019**

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : MEDAN  
Pada Tanggal : 04 Muharram 1440 H  
14 September 2018 M

Dekan ✓

  
**H. JANURI, SE, MM, M.Si**  


Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Bertanggung jawab





**BADAN AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SERTIFIKAT KELULUSAN**

Nomor : 1180 /IL.3-AU/UMSU-BIM/F/2018

Diberikan Kepada:

**Nama : NATASYA DIAN PRAHASKI**

**NPM : 1405170485**

Sebagai peserta ujian komprehensif mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang diadakan pada hari/tanggal

Kamis, 13 Jumadil Akhir 1439H / 01 Maret 2018M

Dinyatakan  
**LULUS**

Medan, 28 Jumadil Akhir 1439 H

16 Maret 2018 M

**BADAN AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Ketua

Nur Rahman Amini, M.Ag



Sekretaris

Rasta Kurniawati Br Pinem, M.A





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
UPT PERPUSTAKAAN**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238  
Website: <http://perpustakaan.umsu.ac.id>

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: ~~4229~~/KET/II.9-AU/UMSU-P/M/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

**Nama** : Nastasya Dian Prahaski  
**NPM** : 1405170485  
**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis  
**Jurusan/ P.Studi** : Akuntansi

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 4 Muharram 1440 H  
15 September 2018 M

Plt. Kepala UPT Perpustakaan,



Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd